

LAPORAN MONITORING & EVALUASI

RENCANA AKSI NASIONAL VI OPEN GOVERNMENT INDONESIA

SEMESTER IV TAHUN 2022



Disusun oleh:

Tim Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
GAMBARAN UMUM MONITORING DAN EVALUASI RAN OGI VI 2020-2022 SEMESTER I – SEMESTER IV	5
CATATAN UMUM PELAKSANAAN RAN OGI VI 2020-2022: SEMESTER I – SEMESTER IV TAHUN 2022	9
TUJUAN, TEMA, DAN KOMITMEN RAN OGI VI 2020-2022	12
STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	16
DESKRIPSI CAPAIAN PELAKSANAAN RAN OGI VI 2020-2022: SEMESTER I – SEMESTER IV TAHUN 2022	20
Komitmen 1.....	35
Komitmen 2.....	45
Komitmen 3.....	55
Komitmen 4.....	63
Komitmen 5.....	71
Komitmen 6.....	77
Komitmen 7.....	89
Komitmen 8.....	96
Komitmen 9.....	107
Komitmen 10.....	116
Komitmen 11.....	124
Komitmen 12.....	133
Komitmen 13.....	142
Komitmen 14.....	150
Komitmen 15.....	156
Komitmen 16.....	163
Komitmen 17.....	166
Komitmen 18.....	176



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VI Semester IV Tahun 2022 telah selesai disusun. Dalam rangka mendorong praktik keterbukaan pemerintah, RAN OGI disusun dan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Selama proses implementasi, monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pemetaan hambatan terhadap keberjalanan komitmen di dalam rencana aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan setiap semester pada 6 (enam) bulan sekali dengan meminta K/L serta OMS pelaksana melaporkan data dukung pada sistem Monev OGI untuk OMS dan SISMONEV KSP untuk K/L.

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui komunikasi yang intensif dengan K/L dan OMS pelaksana untuk mendapatkan keakuratan data dukung dalam melaksanakan capaian administratif dan proses ko-kreasi. Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan 21 K/L dan 24 OMS pelaksana dengan jumlah target capaian yang mencapai 245 target capaian dari Semester I hingga Semester IV. Berbagai komitmen telah terlaksana dengan baik sebagai bentuk hasil kerja keras dan kolaborasi sinergis dari seluruh K/L dan OMS pelaksana.

Dengan demikian, perkenankan kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi semua pihak yang telah mendukung Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dalam penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VI Semester IV Tahun 2022. Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini dapat menjadi acuan dalam implementasi komitmen yang lebih baik pada RAN OGI periode ke depan.

Direktur Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

Priyanto Rohmattullah, S.E., M.A.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dorongan masyarakat untuk menghadirkan pemerintah yang transparan, akuntabel, partisipatif, inovatif, dan inklusif menjadikan keterbukaan pemerintah merupakan elemen penting yang harus dikedepankan. Upaya keterbukaan pemerintah didorong melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga langkah progresif sebagai salah satu dari delapan negara pendiri inisiatif keterbukaan pemerintah dalam tingkat global, *Open Government Partnership* (OGP), pada tahun 2011. Melalui keanggotaannya dalam OGP, Pemerintah Indonesia melaksanakan inisiatif keterbukaan pemerintah melalui penyusunan, implementasi, pengawasan dan evaluasi terkait Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI) secara periodik.

RAN OGI pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 dan pada tahun 2020 disusun RAN OGI VI disusun dan diterbitkan untuk diimplementasikan pada tahun 2021-2022. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RAN OGI VI, dalam pelaksanaannya komitmen-komitmen yang terdapat dalam RAN OGI diimplementasikan secara ko-kreasi oleh Kementerian/Lembaga dan juga Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Berkaitan dengan proses implementasi dari masing-masing komitmen, pada setiap semesternya Sekretariat OGI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi RAN OGI dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah sama-sama ditetapkan. Oleh karenanya, dokumen monitoring dan evaluasi disusun dan diterbitkan dengan maksud untuk meninjau seberapa jauh capaian implementasi yang telah dikerjakan para *stakeholders* pelaksana pada RAN OGI VI 2020-2022.

Sepanjang tahun 2021-2022 Sekretariat OGI telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi untuk Semester I (B06), Semester II (B12), dan Semester III (B18). Sebagai Monitoring dan Evaluasi yang terakhir untuk RAN OGI VI 2020-2022, maka dokumen ini akan menjelaskan hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Semester IV (B24). Sekretariat OGI akan mendalami capaian dari 21 Kementerian/Lembaga dan 24 OMS dengan berfokus nilai pada konteks capaian administratif dan proses ko-kreasi. Dokumen Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sumber bagi seluruh *stakeholders* untuk dapat mendorong lebih baik lagi pelaksanaan keterbukaan pemerintah pada tahun-tahun ke depan.

GAMBARAN UMUM MONITORING DAN EVALUASI RAN OGI VI 2020-2022 SEMESTER I – SEMESTER IV

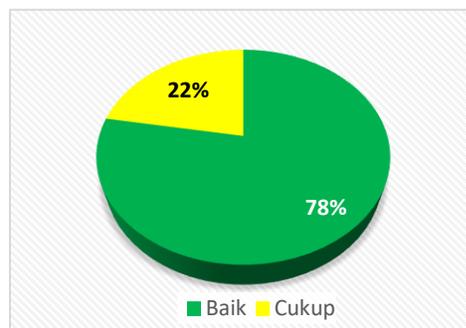
Memasuki Semester IV atau Bulan Ke-24 pelaksanaan RAN OGI, Sekretariat Nasional OGI melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagai bentuk memastikan proses ko-kreasi dan keberjalanan implementasi komitmen sesuai dengan target yang telah disepakati sebelumnya. Adapun gambaran umum dari temuan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VI 2020-2022 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Administratif

Capaian administratif merupakan nilai dari hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target capaian. Adapun capaian administratif dalam pelaksanaan RAN OGI Semester I – Semester IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.

Capaian Administratif Pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022
Semester I – Semester IV



- a. Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi, 78% komitmen atau sejumlah 14 komitmen mendapatkan nilai baik yang menunjukkan target capaian telah terlaksana dengan baik, yakni:

Tabel 1.

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Baik

No.	Judul Komitmen
1.	Komitmen 1: Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2.	Komitmen 3: Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah
3.	Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
4.	Komitmen 5: Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal
5.	Komitmen 6: Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan

6.	Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum
7.	Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban
8.	Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan
9.	Komitmen 12: Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa
10.	Komitmen 13: Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu
11.	Komitmen 14: Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data
12.	Komitmen 15: Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19
13.	Komitmen 16: Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat
14.	Komitmen 18: Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

- b. 22% komitmen atau sejumlah 4 komitmen mendapatkan nilai cukup yang menunjukkan target capaian belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan membutuhkan penyelesaian lebih lanjut dari masing-masing *stakeholder* pelaksana, yakni:

Tabel 2.

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Cukup

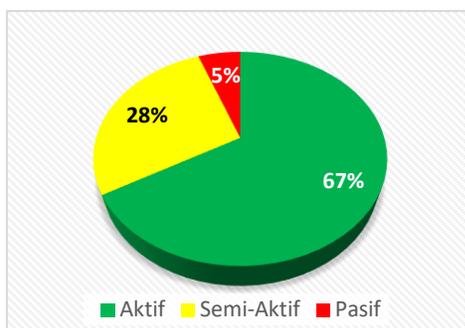
No.	Judul Komitmen
1.	Komitmen 2: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!
2.	Komitmen 7: Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum
3.	Komitmen 10: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi
4.	Komitmen 17: Keterbukaan Data <i>Beneficial Ownership</i>

2. Proses Ko-kreasi

Proses ko-kreasi merupakan penilaian ko-kreasi antara K/L dengan OMS dalam mencapai target capaian. Temuan proses ko-kreasi pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022 pada Semester I – Semester IV adalah sebagai berikut:

Gambar 3.

Proses Ko-kreasi Pelaksanaan Semester I – Semester IV RAN OGI VI 2020-2022



- a. Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi, 67% komitmen atau sejumlah 12 komitmen menunjukkan capaian ko-kreasi aktif, yang menunjukkan proses kolaborasi bermakna antara K/L dan OMS berjalan secara baik. 12 komitmen tersebut, yakni:

Tabel 4.

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Aktif

No.	Judul Komitmen
1.	Komitmen 1: Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2.	Komitmen 3: Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah
3.	Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
4.	Komitmen 5: Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal
5.	Komitmen 6: Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan
6.	Komitmen 7: Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum
7.	Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum
8.	Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban
9.	Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan

10.	Komitmen 12: Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa
11.	Komitmen 17: Keterbukaan Data <i>Beneficial Ownership</i>
12.	Komitmen 18: Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

- b. 28% komitmen atau sejumlah 5 komitmen menunjukkan proses ko-kreasi semi-aktif, yang menunjukkan baik K/L maupun OMS belum sepenuhnya berkolaborasi secara optimal. 5 komitmen tersebut antara lain, yakni:

Tabel 5.

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Semi-Aktif

No.	Judul Komitmen
1.	Komitmen 2: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!
2.	Komitmen 10: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi
3.	Komitmen 13: Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu
4.	Komitmen 14: Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data
5.	Komitmen 15: Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19

- c. 5% komitmen atau sejumlah 1 komitmen menunjukkan proses ko-kreasi kurang, yang menunjukkan baik K/L maupun OMS belum berkolaborasi secara bermakna. 1 komitmen tersebut antara lain, yakni:

Tabel 6.

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Pasif

No.	Judul Komitmen
1.	Komitmen 16: Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat

CATATAN UMUM PELAKSANAAN RAN OGI VI 2020-2022: SEMESTER I – SEMESTER IV TAHUN 2022

Pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022 memberikan pembelajaran penting bagi seluruh aktor pelaksana baik K/L maupun OMS, dan khususnya bagi Sekretariat OGI sebagai pihak yang memberikan pendampingan serta melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Pembelajaran-pembelajaran tersebut akan dijelaskan pada bagian ini dan terbagi ke dalam tiga bagian yakni: 1) terkait catatan umum dan tindak lanjut target capaian, 2) catatan umum dan tindak lanjut implementasi target yang ditujukan bagi *stakeholder* pelaksana, dan 3) catatan umum dan tindak lanjut proses penyusunan serta monitoring dan evaluasi yang ditujukan bagi Sekretariat OGI. Berikut poin-poin refleksi yang didapatkan dalam pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022 untuk Semester I – Semester IV:

1. Catatan Umum Penetapan Target Capaian RAN OGI

Dalam dokumen RAN OGI, Target Capaian memiliki definisi sebagai tindakan atau kegiatan yang disepakati bersama-sama untuk dijalankan oleh aktor pelaksana baik itu Pemerintah maupun OMS dalam melaksanakan masing-masing komitmen. Target Capaian dalam RAN OGI dibagi ke dalam empat bagian, yakni Target Capaian Semester I (B06), Semester II (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (B24). Dalam pelaksanaannya sampai dengan Semester IV, pembelajaran yang ditemukan dalam penetapan target antara lain, yaitu:

- a. Beberapa Target Capaian belum memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-based*) sehingga belum bisa secara langsung memenuhi Ukuran Keberhasilan komitmen yang telah disepakati untuk dikerjakan pada tahun 2022;
- b. Indikator *outcome* atau *impact* dari tiap-tiap Ukuran Keberhasilan komitmen belum ditetapkan, sehingga ada kalanya Target Capaian menjadi tidak *workable* untuk dijalankan.

Berdasarkan temuan atas Target Capaian di atas, maka beberapa tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk proses implementasi RAN OGI yang lebih baik kedepannya adalah sebagai berikut:

- a. Target Capaian dalam RAN OGI diharapkan ditetapkan dan disepakati dengan terlebih dahulu memerhatikan pemenuhan dari prinsip SMART dan pendetilan Target Capaian diperlukan untuk memperjelas peran atau tanggung jawab tiap aktor pelaksana baik K/L maupun OMS;
- b. Menetapkan kriteria evaluasi berbasis *outcome* atau *impact* sehingga Target Capaian komitmen dapat dikur pada level dampak yang lebih luas, utamanya pada kontribusi nilai-nilai keterbukaan pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif, inovatif, dan partisipatif. Selain



itu bertitik fokus pula pada pertimbangan kemampuan K/L dan OMS di tahun berjalan, apakah Target Capaian dapat dilaksanakan pada periode tahun tersebut atau tidak.

2. Catatan Umum Implementasi Target RAN OGI

Implementasi target secara garis besar dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Dalam pelaksanaannya, masing-masing instansi memiliki sejumlah Target Capaian yang perlu dilaksanakan dan dicapai pada tiap semesternya. Pada proses Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VI 2020-2022 di Semester I – Semester IV, terdapat sejumlah catatan umum yang perlu diperhatikan oleh masing-masing *stakeholder* pelaksana dalam mengimplementasikan target yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Capaian administratif atas pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022 semakin membaik dan proses ko-kreasi antara K/L dan OMS juga semakin aktif;
- b. Perubahan PIC sekaligus perubahan struktur pada K/L dan OMS menjadikan proses komunikasi yang sebelumnya telah dibangun harus secara terpaksa dilakukan dari awal karena terkadang PIC pengganti belum memahami cara/alur kerja dari OGI.

Berdasarkan temuan di atas, maka terdapat beberapa tindak lanjut yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana dalam mengimplementasikan RAN OGI, antara lain:

- a. Dilakukannya penguatan komitmen antar K/L dan OMS dalam mengimplementasikan RAN OGI secara lebih berkualitas, berkesinambungan, dan berdampak;
- b. Mendorong adanya transfer pengetahuan untuk kesinambungan pelaksanaan komitmen apabila terdapat pergantian PIC.

3. Catatan Umum Proses Penyusunan serta Monitoring dan Evaluasi RAN OGI

Proses Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VI 2020-2022 dilaksanakan oleh Sekretariat OGI sebagai verifikator dan menempatkan K/L dan OMS sebagai pelapor yang harus melampirkan data dukung dalam kurun waktu periode Monitoring dan Evaluasi. Catatan umum dalam proses ini antara lain, yakni:

- a. Kriteria monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian target secara kualitatif maupun kuantitatif belum secara akurat dan optimal tersusun, sehingga belum ada standar yang terstruktur dan jelas yang seragam untuk melakukan penilaian;
- b. Pendampingan dan monitoring pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022 belum secara maksimal bisa dilakukan Sekretariat OGI karena adanya kendala keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan temuan atas pelaksanaan di atas, maka tindak lanjut yang menjadi refleksi bagi Sekretariat OGI, yaitu:

- 
- a. Standardisasi yang terstruktur dan jelas terhadap kriteria ketercapaian kualitatif dan kuantitatif yang lebih terukur untuk masing-masing Target Capaian yang mencakup:
- 1) Kriteria penilaian kualitatif, meliputi tahapan atau proses pencapaian target dan hasil dari pencapaian sebuah target;
 - 2) Kriteria penilaian kuantitatif, meliputi presentase yang menggambarkan capaian tahapan atau proses dari target dan persentase yang menggambarkan capaian hasil dari target.

TUJUAN, TEMA, DAN KOMITMEN RAN OGI VI 2020-2022

Dalam rangka mendorong implementasi nilai-nilai keterbukaan pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan OMS untuk melahirkan ide dan aksi praktik keterbukaan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Pemerintah/*Open Government Indonesia* (OGI) VI 2020-2022.

Tema besar RAN OGI VI 2020-2022 disesuaikan dengan kondisi Indonesia dalam menyikapi kondisi pandemi Covid-19, tema tersebut yaitu “Pemulihan Pasca-Pandemi Covid-19 yang Bertujuan untuk Mempercepat Pemulihan Indonesia dari Pandemi Covid-19”. Tema besar ini bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.” Dalam tema besar ini, ada beberapa isu strategis yang didorong yakni penguatan pelayanan publik, antikorupsi, transparansi fiskal, akses terhadap keadilan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik berspektif gender. Tabel berikut menjelaskan 18 komitmen beserta K/L dan OMS pelaksanaannya:

Tabel 7.

Daftar Komitmen RAN OGI VI 2020-2022 beserta Pelaksananya

No.	Judul Komitmen	K/L dan OMS Pelaksana
1.	Komitmen 1: Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1. Komisi Informasi Pusat (KIP) 2. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 3. ICW
2.	Komitmen 2: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) 2. PATTIRO 3. Seknas FITRA
3.	Komitmen 3: Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas 2. MediaLink 3. PWYP 4. TII

4.	Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 3. Yayasan TIFA
5.	Komitmen 5: Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2. Lakpesdam NU
6.	Komitmen 6: Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung 2. Kejaksaan Agung 3. Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM 4. Kepolisian RI 5. OMS Sektor Keadilan: IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, PBHI, YLBHI
7.	Komitmen 7: Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung 2. BPHN Kementerian Hukum dan HAM 3. OMS Sektor Keadilan: IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, PBHI, YLBHI
8.	Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN Kementerian Hukum dan HAM 2. OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi

		LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI
9.	Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban	1. BPHN Kementerian Hukum dan HAM 2. OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI
10.	Komitmen 10: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi	1. BPHN Kementerian Hukum dan HAM 2. Komisi Informasi Pusat 3. OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI
11.	Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan	1. Kementerian Sosial 2. MediaLink
12.	Komitmen 12: Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa	1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 3. OMS: Seknas FITRA, TII, WVI, Kapal



		Perempuan, INFID, Medialink, Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi)
13.	Komitmen 13: Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2. Perludem
14.	Komitmen 14: Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data	1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2. INFID
15.	Komitmen 15: Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19	1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 3. Seknas FITRA
16.	Komitmen 16: Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk Mendorong Efektivitas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat	1. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2. OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI
17.	Komitmen 17: Keterbukaan Data Beneficial Ownership	1. Stranas PK 2. PWYP
18.	Komitmen 18: Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas 2. OMS: Asosiasi LBH APIK Indonesia, IJRS, YLBHI, SAFEnet



STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

MEKANISME PELAKSANAAN RAN OGI VI 2020-2022

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan dua pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan RAN OGI. Dalam pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022, terdapat 21 Kementerian/Lembaga dan 24 OMS yang memiliki sejumlah target capaian yang perlu untuk dilaksanakan dan dilaporkan setiap semesternya kepada Sekretariat Nasional OGI.

Pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan OMS diharapkan selaras dengan ukuran keberhasilan serta target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN OGI VI 2020-2022. Lebih dari itu, diharapkan, dalam pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut, Pemerintah bersama dengan OMS dapat mengerjakannya dengan mengedepankan proses ko-kreasi, sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil. Memasuki periode pelaporan, Pemerintah dan OMS akan memberikan Data Dukung terkait pelaksanaan komitmen melalui dua kanal yang berbeda, yaitu:

1. SISMONEV Kantor Staf Presiden - bagi Kementerian/Lembaga
2. SISMONEV OGI - bagi OMS

MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RAN OGI VI 2020-2022

Dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan, Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu dari proses tersebut yang perlu menjadi perhatian. Sekretariat OGI, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan keberjalanan implementasi, memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi RAN OGI VI 2020-2022. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan waktu Target Capaian, yaitu Semester I (B06), Semester II (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (B24). Hingga dokumen ini diterbitkan, Sekretariat Nasional OGI telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bagi Target Capaian Semester I hingga Semester IV Adapun penjelasan terkait kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dijelaskan pada bagian berikut.

1. Pemantauan (*Monitoring*)

Sekretariat OGI bertugas untuk melaksanakan pemantauan (monitoring) secara intensif pada akhir semester berjalan dengan cara:

- a. Mempelajari laporan data dukung capaian target semester Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil;
- b. Melakukan konfirmasi apabila dinilai terdapat data dukung maupun hal-hal lainnya yang kurang jelas atau perlu dilengkapi oleh Kementerian Lembaga/ Organisasi Masyarakat Sipil.



Mekanisme pemantauan akan dijalankan oleh Sekretariat OGI sepanjang waktu target capaian berjalan, hingga pada periode monitoring dan evaluasi RAN OGI VI 2020-2022 setiap semesternya.

2. Evaluasi

Sekretariat OGI melaksanakan evaluasi terhadap capaian target yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam memberikan penilaiannya, Sekretariat OGI tidak hanya melakukan penilaian secara administratif, tetapi juga kualitas pelaksanaan yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan rencana aksi yang dilaporkan memang telah dilaksanakan (tidak sekedar administratif);
- b. Memastikan rencana aksi dilaksanakan dengan kualitas yang baik;
- c. Memastikan rencana aksi akan berkesinambungan;
- d. Memastikan para pelaksana menyadari bahwa rencana aksi membawa perubahan (output-outcome);
- e. Memastikan rencana aksi telah mencapai perubahan (dampak/impact) tidak hanya bagi pelaksana tapi juga penerima manfaat (masyarakat luas).

Untuk pelaksanaan sampai dengan Semester IV, Sekretariat Nasional OGI fokus pada evaluasi pada poin “a” dan “b”. Namun untuk tahun berikutnya, dalam hal ini tahun 2023, Sekretariat OGI juga akan fokus pada poin “c”, “d”, dan “e”. Dalam melaksanakan evaluasi hingga Semester IV RAN OGI 2020-2022, Sekretariat OGI melakukan analisis yang terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi capaian target, termasuk hambatan yang dialami oleh masing-masing komitmen, mulai dari Ukuran Keberhasilan, hingga Target Capaian masing-masing semester;
- b. Melakukan identifikasi Ko-kreasi serta Target Semester yang belum terselesaikan. Sekretariat OGI akan menganalisis kegiatan ko-kreasi yang dilakukan masing-masing pelaksana, serta meninjau kembali pelaksanaan target capaian yang tidak dapat diselesaikan pada semester sebelumnya.

Proses Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VI 2020-2022 dilaksanakan Sekretariat OGI dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penilaian Capaian Administratif

Salah satu komponen penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat OGI ialah penilaian Capaian Administratif. Penilaian ini bermakna untuk mengukur hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target capaian di dalam komitmen. Adapun kriteria penilaian pada bagian ini terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:



Tabel 8.

Skala Penilaian Capaian Administratif

Skala Nilai	Keterangan
70-100	Baik
51-69	Cukup
0-50	Kurang
N/A	<i>Not Available*</i>

*Target tidak dapat diukur pelaksanaannya karena membutuhkan dukungan dari pelaksana lainnya

b. Penilaian Proses Ko-kreasi

Sebagai salah satu mandat dalam pelaksanaan RAN, Sekretariat OGI menjadikan Proses Ko-kreasi sebagai salah satu komponen penilaian. Komponen ini menjelaskan sejauh mana ko-kreasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan komitmen RAN OGI. Adapun kriteria penilaian proses ko-kreasi ialah sebagai berikut:

Tabel 9.

Skala Penilaian Proses Ko-kreasi

	Aktif
	Semi-Aktif
	Pasif
	(N/A) Tidak bisa dilaksanakan, karena bergantung pada pelaksana lainnya

c. Pelaporan

Penyusunan laporan yang dilakukan oleh Sekretariat OGI setiap akhir semester memberikan penekanan maupun sorotan baik secara kualitatif dan kuantitatif terhadap tiga hal, yakni:

- 1) Capaian Administratif;
- 2) Proses Ko-kreasi;
- 3) Refleksi Implementasi.

MEKANISME PELENGKAPAN LAPORAN CAPAIAN TARGET

Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VI periode 2020-2022 telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Berdasarkan hasil Monev, didapati bahwa terdapat sejumlah target



capaian yang telah berhasil dipenuhi sepenuhnya, tetapi juga terdapat sejumlah target capaian yang tidak dapat diselesaikan pada rentang waktu yang telah disepakati dalam dokumen RAN VI OGI periode 2020-2022. Menindaklanjuti kasus tersebut, Sekretariat Open Government Indonesia, akan membuka mekanisme Pelengkapan Laporan Capaian Target baik itu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan juga Kementerian / Lembaga. Mekanisme Pelengkapan Laporan Capaian Target dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Tenaga Ahli Sekretariat Open Government Indonesia.

DESKRIPSI CAPAIAN PELAKSANAAN RAN OGI VI 2020-2022: SEMESTER I – SEMESTER IV TAHUN 2022

Dalam pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022, terdapat 18 komitmen dengan 247 Target Capaian yang perlu diimplementasikan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Adapun hasil capaian dari target-target tersebut adalah sebagai berikut:

I. Berdasarkan Capaian Administratif Kementerian/Lembaga

Rincian capaian administratif B06, B12, B18, dan B24 serta akumulasi target capaian keseluruhan dari Kementerian/Lembaga terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 10.
Akumulasi Capaian Administratif Kementerian/Lembaga pada Semester I – Semester IV RAN OGI VI 2020-2022

Indikator	B06	B12	B18	B24	Akumulasi B06 – B24
Baik (70-100)	26	33	27	27	113
Cukup (51-69)	0	0	0	0	0
Kurang (0-50)	7	4	6	6	23
Kinerja tidak dapat dinilai (N/A)	2	1	0	2	5
Total	35	38	33	35	141

Berdasarkan tabel di atas, akumulasi capaian administratif K/L dari periode B06 hingga akhir periode implementasi di B24 RAN OGI VI adalah sebagai berikut:

- a. 80% (113) Target Capaian memiliki kinerja baik;
- b. 16% (23) Target Capaian memiliki kinerja kurang;
- c. 4% (5) Target Capaian mendapat penilaian N/A.

II. Berdasarkan Capaian Administratif Organisasi Masyarakat Sipil

Rincian capaian administratif B06, B12, B18, dan B24 serta akumulasi target capaian keseluruhan dari Organisasi Masyarakat Sipil terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 11.
Akumulasi Capaian Administratif Organisasi Masyarakat Sipil pada Semester I – Semester IV RAN OGI VI 2020-2022

Indikator	B06	B12	B18	B24	Akumulasi B06 – B24
Baik (70-100)	17	22	15	18	72

Cukup (51-69)	0	0	0	1	1
Kurang (0-50)	8	4	7	6	25
Kinerja tidak dapat dinilai (N/A)	4	3	0	1	8
Total	29	29	22	26	106

Berdasarkan tabel di atas, akumulasi capaian administratif OMS dari periode B06 hingga akhir periode implementasi di B24 RAN OGI VI adalah sebagai berikut:

- 68% (72) Target Capaian memiliki kinerja baik;
- 1% (1) Target Capaian memiliki kinerja cukup;
- 24% (25) Target Capaian memiliki kinerja kurang;
- 7% (8) Target Capaian mendapat penilaian N/A.

Deskripsi Capaian Akhir 18 Komitmen RAN OGI VI 2020-2022

Monitoring dan Evaluasi pada B24 merupakan periode Monev terakhir dari pelaksanaan RAN OGI VI 2020-2022. Oleh karenanya perlu untuk melihat ketercapaian dari ukuran keberhasilan pada tiap komitmen yang dijalankan baik oleh K/L maupun OMS. Deskripsi capaian akhir dari tiap-tiap ukuran keberhasilan yang telah dikerjakan K/L dan OMS melalui proses ko-kreasi tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10.
Deskripsi Capaian 18 Komitmen RAN OGI VI 2020-2022

No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
Komitmen 1: Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				
1	Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ)	<ol style="list-style-type: none"> Komisi Informasi Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Indonesia Corruption Watch 	<p>Diterbitkannya revisi PERKI SLIP yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa</p> <p>Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Telah diterbitkan revisi PERKI SLIP yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan PBJ.</p> <p>Telah tersusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang memiliki indikator transparansi dalam bidang dunia usaha dengan sub-indikator keterbukaan informasi PBJ.</p>



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			Terbukanya informasi seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP	Telah terdapat fitur pencatatan pengadaan darurat pada SPSE versi 4.5, adapun contoh LPSE yang telah menggunakan fitur pencatatan pengadaan darurat adalah LPSE Provinsi Jawa Barat , LPSE Provinsi Jawa Timur , LPSE Provinsi Bali , LPSE Kabupaten Buleleng , dan LPSE Kabupaten Ponorogo .
Komitmen 2: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!				
2.	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Pattiro 	<p>Laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti (target tingkat penyelesaian minimal 45% dari jumlah pengaduan pada tahun 2022).</p> <p>Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022).</p>	<p>Pada tahun 2022, sebanyak 84,46% jumlah laporan telah ditindaklanjuti oleh instansi penerima laporan. Laporan ditindaklanjuti terdiri dari laporan dengan status proses (6,62%), selesai (42,52%), dan diarsipkan (35,32%).</p> <p>Jumlah K/L/PD yang telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan adalah sebesar 458 (66,15%) dari 703 K/L/PD. Presentase laporan selesai sebesar 346 laporan (49,2%).</p>



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik.	Rekapitulasi laporan dan informasi terkait pengaduan publik dapat diakses melalui laman SP4N LAPOR!
			Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengaduan sedikitnya 200 laporan dari 30% instansi pemerintah yang terhubung dengan SP4N- LAPOR!	Jumlah pengaduan K/L/PD yang telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan adalah sebesar 458 (66,15%) dari 703 K/L/PD.
Komitmen 3: Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah				
3.	Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Publish What YouPay 	Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Telah dilaksanakan penyusunan, penetapan draft, dan implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project.
Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat				
4.	Pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Yayasan TIFA 	Menguatnya Kapasitas masyarakat dan pendamping Desa untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan	Telah dilaksanakan pelatihan untuk pendalaman konsep evaluasi program pembangunan masyarakat pada Desa Guwosari dan Desa Sriharjo.



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			inovasi di dua desa <i>pilot project</i> .	Telah dilaksanakan fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi kepala desa, pemerintah desa, dan BPD.
			Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di dua desa.	Telah dilaksanakan bimbingan teknis melalui pilot project di Kalurahan Guwosari dan Sriharjo yang diselenggarakan Yayasan Tifa dengan keterlibatan dari Kementerian Desa PDTT.
Komitmen 5: Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal				
5.	Terlaksananya diseminasi Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Admininstrasi Negara Lakpesdam PBNU 	Jumlah daerah yang mendapatkan diseminasi konsep "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal" kepada kalangan OPD	Telah dilaksanakan diseminasi konsep Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bulukumba, Nias Utara, dan Merauke.
Komitmen 6: Peraturan Pelaksana untuk Asesmen Pemenuhan Kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Setiap Tahapan Acara Peradilan				
6.	Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan	<ol style="list-style-type: none"> Mahkamah Agung Kejaksaan RI Kepolisian RI Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (IJS) 	Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung	Mahkamah Agung telah membuat peraturan teknis berupa SK Ditjen Badilum , SK Ditjen Badilag , dan SK Ditjen Badmilitun , serta mengumpulkan laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SK Ditjen Badilag
			Adanya peraturan	Draf peraturan teknis terkait pelaksanaan



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kejaksaan	asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas telah disusun secara ko-kreasi, namun peraturan teknis belum dapat terbit pada periode 2020-2022.
			Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kepolisian.	Draf peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas telah disusun oleh Kepolisian RI secara ko-kreasi bersama dengan Pusham UII, namun peraturan teknis belum dapat terbit pada periode 2020-2022.
			Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga permasyarakatan.	Telah diterbitkan peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga permasyarakatan, serta laporan hasil evaluasi di wilayah <i>piloting</i> .
			Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi	OMS Sektor Keadilan telah dilibatkan oleh Kejaksaan Agung dalam proses penyusunan draf peraturan teknis



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan.	
Komitmen 7: Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum				
7.	Penguatan portal informasi terkait bantuan hukum	1. Mahkamah Agung 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM 3. Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (IJS)	Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	BPHN telah menyediakan portal informasi bantuan hukum melalui platform SIDBANKUM . Namun, masih belum ada portal informasi yang terintegrasi antar BPHN dan Mahkamah Agung.
			Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.	OMS Sektor Keadilan sudah melakukan pengumpulan informasi dari BPHN dan wawancara dengan akademisi untuk mengevaluasi kebutuhan masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum .
Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum				
8.	Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum	1. Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM 2. Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (PBHI)	Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH).	Telah dilakukan verifikasi dan akreditasi PBH baru periode 2022-2024, dan tersedianya rekomendasi tentang proses verifikasi dan akreditasi dalam rangka meningkatkan jumlah dan sebaran PBH.



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			<p>Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.</p>	<p>Telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan evaluasi implementasi Peraturan Menteri tersebut.</p> <p>PBHI telah melakukan pelatihan paralegal dalam rangka meningkatkan kapasitas paralegal.</p>
			<p>Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum</p>	<p>Telah terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum dan tersedianya laporan evaluasi implementasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.</p>
<p>Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban</p>				
<p>9.</p>	<p>Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM 2. Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (LBH APIK) 	<p>Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</p>	<p>Telah tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban, terutama kelompok rentan dan perempuan, berupa kurikulum pendidikan yang tertuang dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal serta pengawasan pelaksanaan kurikulum untuk</p>



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
				korban rentan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana bantuan hukum.
			Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	Telah dilaksanakan pelatihan bagi paralegal di beberapa wilayah bagi PBH terakreditasi untuk pemberian layanan yang berperspektif korban dan sensitif terhadap kelompok rentan dan gender.
Komitmen 10: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi				
10.	Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Komisi Informasi Pusat 4. Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (Koordinator YLBHI) 	Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	<p>BPHN telah memberikan rekomendasi atas hasil kajian yang telah dilakukan untuk pemberian bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p> <p>OMS telah menyusun kajian tentang pemberian bantuan hukum dalam penanganan sengketa informasi.</p>



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi nonlitigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).	KIP telah menyediakan data sengketa informasi , namun KIP tidak memiliki wewenang terlibat dalam ranah bantuan hukum, sehingga keterlibatannya terbatas pada penyediaan data sengketa informasi.
Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan				
11.	Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan	1. Kementerian Sosial 2. Perkumpulan Media Lintas Komunitas	Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS – NG.	Integrasi DTKS dengan BPNT, PKH, dan BST. Telah terdapat aplikasi SAGIS untuk verifikasi dan validasi data Penerima Manfaat.
			Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap <i>feedback</i> masyarakat.	Transparansi bantuan sosial dapat diakses melalui cekbansos dan kemensos dan layanan pengaduan terkait Bansos dapat diakses melalui aplikasi Usul-Sanggah.
Komitmen 12: Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa				
12.	Implementasi Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Organisasi Masyarakat Sipil (WVI, Seknas FITRA, TI Indonesia, Kapal Perempuan, INFID, MediaLink)	Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan	Telah terlaksana akuntabilitas sosial melalui kegiatan diseminasi uji coba score card di 320 desa.
			Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan	Telah dilaksanakan Pelatihan Aparatur



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			BPD untuk memahami konsep implementasi akuntabilitas sosial.	Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur.
			Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa	Telah terlaksana replikasi akuntabilitas sosial suara dan aksi warga/citizen voice action di Kabupaten Kupang, Sumba Timur, dan Timor Tengah Selatan .
Komitmen 13: Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu				
13.	Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu	1. Komisi Pemilihan Umum RI 2. Perludem	Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data) dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh KPU.	Telah tersedia sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dalam www.opendata.kpu.go.id yang menyediakan 9 Topik dengan 155 Dataset yang dapat diakses oleh publik. Perludem juga telah membuat laporan penelitian dan policy brief terkait sistem informasi penyelenggaraan pemilu dalam format data terbuka



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel	Telah dilaksanakan uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di TPS Kabupaten Bandung.
Komitmen 14: Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data				
14.	Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data	1. Kementerian Kesehatan 2. INFID	Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data yang dapat diakses oleh publik.	Sistem keterbukaan informasi pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi berbasis data tersedia melalui <i>dashboard</i> dalam platform Satu Sehat yang dikembangkan Kemenkes.
			Sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik.	Sosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan survei pengumpulan persepsi umum dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi berbasis data dan M-KIA kepada publik.
Komitmen 15: Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19				
15.	Keterbukaan Informasi Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Keuangan 3. Organisasi Masyarakat Sipil (Seknas FITRA,	Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerah (dalam APBD) yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan	Portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerah yang dapat diakses oleh publik telah tersedia dalam portal keuda kemendagri .



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
		Pattiro, IBC)	Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat pusat yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.	Portal informasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di tingkat pusat yang dapat diakses oleh publik telah tersedia dalam protal pen.kemenkeu.go.id .
			Terlaksananya kolaborasi pengembangan portal informasi realisasi anggaran pandemi COVID-19 yang komprehensif dan telah diaudit	Kolaborasi terlaksana melalui penyusunan dan penyampaian kajian terkait pengembangan portal informasi anggaran dan diskusi/FGD yang dilaksanakan melalui webinar dan audiensi kepada Kemenkeu .
Komitmen 16: Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat				
16.	Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat.	Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal HAM, BPHN, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU KKR	Direktorat Instrumen HAM telah melibatkan masyarakat sipil dalam proses penyusunan kajian substansi rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).
Komitmen 17: Keterbukaan Data Beneficial Ownership				
17.	Keterbukaan Data Beneficial Ownership	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Energi 	Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait	Tersedianya basis data BO memiliki indikator jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO. Sampai dengan September 2022 jumlah korporasi aktif



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
		<p>dan Sumber Daya Mineral</p> <p>5. Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah</p> <p>6. Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional</p> <p>7. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</p> <p>8. Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>9. Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)</p> <p>11. Publish What You Pay</p>		<p>yang telah mendeklarasikan BO adalah 38% korporasi aktif.</p>
			<p>Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat</p>	<p>Telah tersedia basis data BO yang dapat diakses oleh publik yang dikembangkan oleh Kemenkumham pada portal bo.ahu.go.id.</p>
			<p>Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.</p>	<p>Telah terlaksana pemanfaatan data BO sebesar 57,5% dengan indikator jumlah akses layer APH, jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif, dan jumlah PBJ yang data BO korporasi pesertanya terverifikasi</p>
			<p>Adanya keterlibatan dan peran aktif Masyarakat Sipil dalam setiap tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, baik dalam pencapaian:</p> <p>1. Tersedianya basis data BO</p> <p>2. Terbukanya akses data BO kepada Publik</p>	<p>Peran aktif telah dilakukan dengan dilaksanakannya berbagai rapat koordinasi dan PWYP telah melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan <i>lesson learnt</i> pelaksanaan Aksi BO dalam Rencana Aksi untuk periode 2021-2022.</p>



No.	Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Akhir
			3. Termanfaatkannya data BO oleh Masyarakat Sipil, APH maupun K/L	
Komitmen 18: Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan				
18.	Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan	Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berkepres, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.	Tersedianya hasil penelitian yang disusun secara ko-kreasi antar Kementerian PPN/Bappenas dan OMS Sektor Keadilan.
			Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berkepres, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.	Tersedianya hasil penelitian yang disusun secara ko-kreasi antar Kementerian PPN/Bappenas dan OMS Sektor Keadilan, serta laporan FGD terkait kerangka keadilan restoratif dalam implementasi perluasan ruang kewargaan di Indonesia.

Komitmen 1

Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ukuran Keberhasilan 1:		
Diterbitkannya revisi PERKI SLIP (Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik) yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.		
Komisi Informasi Pusat (KIP)		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Diterbitkannya dokumen peraturan yang merupakan revisi PERKI SLIP.	Telah terbit peraturan revisi PERKI SLIP, yaitu PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP yang mendetailkan informasi pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan.	
	Proses Ko-kreasi:	Aktif
	Dalam proses penyusunan PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) secara aktif berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW terlibat mendetailkan informasi pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan.	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Badan Publik terutama Kementerian/ Lembaga (K/L). Koordinasi dengan Kementerian 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP (PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara daring dan <i>hybrid</i>. Setelah PERKI 1/2021 diterbitkan, KIP telah aktif mengundang Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan badan publik untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, agar badan publik dapat membuka data sesuai dengan ketentuan dalam PERKI1/2021. Sosialisasi ini dilakukan bertahap, pertama pada badan publik meliputi K/L, dan 	



<p>Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>Pemerintah Daerah. Kedua, sosialisasi dilakukan pada pihak eksternal yakni BUMN, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Komisi Informasi Daerah, dan OMS.</p> <p>3. Materi sosialisasi sudah menekankan informasi detail pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan, yang sudah ditayangkan juga secara online pada saluran youtube KIP.</p> <p>4. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Daerah telah dilakukan ketika sosialisasi PERKI 1/2021. Kementerian Dalam Negeri sebagai peserta sosialisasi juga diharapkan dapat aktif mendorong keterbukaan di level daerah sesuai dengan PERKI 1/2021.</p> <p>Proses Ko-kreasi: Sosialiasi telah dilakukan pada OMS.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18: Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Badan Publik Terutama K/L</p>	<p>Capaian Target: Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan sosialisasi terhadap 34 Kementerian, 33 Lembaga Non Struktural, dan 45 Lembaga Negara Non Kementerian, dan 34 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, proses sosialisasi terkait PERKI SLIP 2021 saat ini sedang dilaksanakan oleh masing-masing Badan Publik.</p> <p>Proses Ko-kreasi</p>	<p>Nilai: 100%</p> <p>Aktif</p>
<p>Target B24: Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Badan Publik terutama K/L</p>	<p>Capaian Target: Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP), sosialiasi dilakukan kepada badan publik sebagaimana pada rincian yang ada di B18. Sosialisasi dilaksanakan secara <i>hybrid</i> dan rekaman dari hasil sosialisasi dapat diakses secara terbuka oleh publik pada kanal Youtube Komisi Informasi Pusat yang dapat diakses pada link</p>	<p>Nilai: 100%</p>



	<p>https://youtu.be/41MP3qtkCmg. Berdasarkan hasil verifikasi, hingga saat ini sosialisasi PERKI SLIP juga sedang terus dilaksanakan oleh masing-masing Badan Publik.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi dilaksanakan melalui keterlibatan KIP dan ICW dalam berbagai rapat koordinasi</p>	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
<p>Target B12:</p> <p>Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada publik.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>ICW telah melakukan sosialisasi PERKI SLIP dalam agenda pelatihan ICW di tahun 2021.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>ICW telah melakukan sosialisasi PERKI SLIP dalam agenda pelatihan ICW di tahun 2021. ICW juga aktif mendiseminasikan melalui tulisan misalnya https://www.antikorupsi.org/index.php/id/article/dokumen-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-adalah-informasi-publik</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada publik</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>ICW telah melaksanakan sosialisasi PERKI SLIP, sosialisasi tersebut dilaksanakan pada kegiatan <i>Open Government Week 2022</i>, pada Kamis, 19 Mei 2022. Selengkapnya terkait kegiatan sosialisasi dapat diakses dalam laman berikut:</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=GwWKO9ctq6l</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>ICW telah melaksanakan kokreasi dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Romanus Ndau Lendong (Komisioner Informasi Pusat), untuk menjelaskan terkait Urgensi Keterbukaan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia</p>	Aktif
<p>Target B24:</p> <p>Sosialisasi</p>	<p>Capaian Target:</p>	Nilai: 100%



peraturan revisi PERKI SLIP pada publik.	Sosialisasi revisi PERKI SLIP telah dilaksanakan kepada publik melalui diskusi publik dan webinar di OG Week.	
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dilaksanakan melalui pelibatan LKPP dan KIP sebagai narasumber dalam proses Sosialisasi.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.		
ICW		
Target B06: Memberikan bantuan dalam menjangkau masukan atas opini publik.	Capaian Target: ICW belum memberikan laporan atau kajian terkait masukan publik terkait Indeks Keterbukaan Informasi.	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak melaksanakan penjangkauan masukan publik terkait Indeks Keterbukaan Informasi.	Pasif
KIP		
Target B12: Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) telah dilakukan sepanjang 2020-2021. 2. IKIP 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori berkualitas “sedang”, yang terbangun atas 3 indikator: <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian tertinggi pada Lingkungan Hukum, yaitu ‘jaminan hukum atas akses informasi’ sebesar 79,15. b. Penilaian terendah pada Lingkungan Ekonomi, yaitu ‘transparansi’ sebesar 65,10. c. Sedangkan untuk Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu ‘literasi publik’ sebesar 65,95 serta ‘partisipasi publik’ sebesar 67,29. 3. Berdasarkan daerah, IKIP 2021 menempatkan Provinsi Bali pada peringkat pertama provinsi dengan keterbukaan informasi publik ‘baik’, sedangkan Provinsi Papua Barat pada peringkat 	Nilai: 100%



	<p>akhir provinsi dengan keterbukaan informasi publik 'buruk'.</p> <p>4. Berdasarkan karakteristik informan yang disurvei, menunjukkan penilaian tertinggi diberikan oleh informan badan publik negara atau pemerintah, sedangkan informan masyarakat dan pelaku usaha memberikan penilaian terendah pada keterbukaan informasi publik.</p> <p>5. IKIP 2021 memiliki indikator transparansi dalam bidang dunia usaha yang memiliki sub-indikator yakni: pengelolaan anggaran publik dan badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Menurut hasil IKIP, Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki skor baik di bidang ini. Indikator transparansi skor Aceh dalam bidang dunia usaha termasuk kategori situasi baik dengan dua sub indicator: a) tingkat pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dengan skor 82,33; dan b) pengelolaan anggaran publik dan badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan skor 84,89.</p> <p>6. Tidak ada rekomendasi khusus pada LKPP dan pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>KIP telah melibatkan ICW dalam penyusunan IKIP 2021 sebagai narasumber umum, namun tidak khusus dalam hal memberikan masukan terkait metodologi IKIP.</p>	<p>Semi Aktif</p>
<p>Ukuran Keberhasilan 3:</p> <p>Terbukanya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP.</p>		
<p>LKPP</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Persiapan pengembangan portal pengadaan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah terlaksana persiapan pengembangan <i>mockup</i> portal untuk pencatatan pengadaan dalam kondisi darurat. Portal tersebut akan berisi informasi</p>	<p>Nilai: 100%</p>

nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa termasuk dalam kondisi darurat.	tentang: Nama Paket, Instansi, Tanggal Pembuatan Paket, Metode Pengadaan, Jenis Pengadaan, Tahun Anggaran, Pagu Anggaran, dan Penyedia Berkontrak. Portal ini dijadwalkan akan selesai pada bulan Desember 2021.	
	Proses Ko-kreasi: Tidak terjadi koordinasi antara ICW dan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.	Pasif
ICW		
Target B06: Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat Nasional.	Capaian Target: ICW tidak dapat melaksanakan target karena tidak adanya koordinasi dari LKPP untuk melakukan rapat pembahasan pengembangan portal Pengadaan Barang dan Jasa dalam kondisi darurat nasional.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: ICW tidak dilibatkan oleh LKPP untuk berkoordinasi.	
Target B12: Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa	Capaian Target: ICW telah melaksanakan target dengan mengadakan rapat dengan LKPP terkait pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa pada 8 September 2021.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa ICW masih belum bisa terlibat dalam pengembangan portal pengadaaan darurat.	Aktif



dalam kondisi darurat.		
Target B18: Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	Capaian Target: ICW telah melaksanakan koordinasi dengan LKPP pada 17 Juni 2022. Dalam koordinasi tersebut, ICW mendapatkan penjelasan terkait portal pengembangan pengadaan barang/jasa darurat yang dikembangkan oleh LKPP, serta memberikan catatan terkait dengan portal tersebut yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pelibatan unsur masyarakat lainnya, seperti Transparency International Indonesia (TII). • LKPP dapat memperluas jaringan K/L dan Pemerintah Daerah yang menggunakan portal Pengadaan Barang dan Jasa secara darurat. 	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: ICW telah melaksanakan kokreasi dalam bentuk memberikan masukan kepada LKPP terkait dengan fitur serta strategi pengembangan portal Pengadaan Barang/Jasa darurat	Aktif
Target B24: Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	Capaian Target: Portal pengadaan darurat telah dikembangkan LKPP & ICW memberikan input terkait poin-poin penting untuk penyempurnaan dashboard PBJ Darurat yang ditampilkan pada publik. Hal ini dilakukan melalui rapat pembahasan yang dilaksanakan pada September 2022 yang dihadiri oleh LKPP, KIP, TII, dan ICW.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: ICW telah melaksanakan kokreasi dalam bentuk memberikan masukan kepada LKPP terkait dengan fitur serta strategi pengembangan portal PBJ Darurat.	Aktif



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
<p>Target (1) B12:</p> <p>Peraturan yang dibuat oleh LKPP sebagai tindak lanjut revisi PERKI SLIP (apabila terdapat perubahan yang perlu ditindaklanjuti dalam peraturan LKPP dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa).</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keputusan PPID LKPP 3/2021) dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID LKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 (Keputusan PPID LKPP 4/2021) masih berupa draft. Draft Peraturan ini telah memberikan daftar informasi dan data terkait PBJ yang wajib dan dikecualikan untuk dibuka pada publik, sesuai dengan PERKI 1/ 2021. Draft ini rencananya akan diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021. 	<p>Nilai: 90%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Tidak melibatkan ICW.</p>	
<p>Target (2) B12:</p> <p>Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Persiapan yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan informasi kebutuhan terkait pengembangan pencatatan pengadaan darurat. Pembuatan mockup pencatatan pengadaan darurat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Pengembangan portal untuk pencatatan pengadaan darurat tidak dilakukan bersama</p>	



	dengan ICW karena pengembangan teknis tampilan website berada di ranah internal.	
Target B18: Pengembangan Portal Pengadaan Nasional atau Sistem Informasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kondisi Darurat	Capaian Target: LKPP telah mengembangkan versi <i>dummy</i> Portal Pengadaan Barang/Jasa darurat, yang rencananya digabungkan dalam SPSE versi 4.5. Hasil pemantauan Sekretariat OGI telah menemukan fitur “Pencatatan Pengadaan Darurat” dalam portal https://lpse.lkpp.go.id/eproc4	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP telah melaksanakan Kokreasi dengan ICW melalui adanya pertemuan yang diinisiasi oleh LKPP pada, Jumat, 17 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut LKPP melaksanakan demo penggunaan portal, serta menerima masukan-masukan dari ICW untuk ditindaklanjuti pada target selanjutnya.	Aktif
Target B24: Tersedianya informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat melalui portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP	Capaian Target: LKPP telah mengembangkan fitur pencatatan pengadaan darurat pada aplikasi SPSE versi 4.5 dan sudah terdapat 566 LPSE yang menggunakan SPSE versi tersebut. LKPP melampirkan data dukung yang menampilkan informasi LPSE yang sudah menggunakan fitur pencatatan pengadaan darurat, antara lain LPSE Provinsi Jawa Barat, LPSE Provinsi Jawa Timur, LPSE Provinsi Bali, LPSE Kabupaten Buleleng, dan LPSE Kabupaten Ponorogo. Adapun <i>dashboard</i> pengadaan darurat pada SPSE versi 4.5 memiliki informasi yang di dalamnya memuat kode paket, nama paket, tanggal pembuatan, K/L/PD, satuan kerja, jenis pengadaan, metode pengadaan, tahun anggaran, nilai pagu paket, nilai realisasi, nilai PDN, nilai UMK, tanggal paket selesai, nama penyedia berkontrak, dan jenis realisasi.	Nilai: 100%



	<p>Proses Ko-kreasi</p> <p>LKPP dan ICW telah secara aktif melakukan proses ko-kreasi lewat adanya rapat koordinasi, salah satunya dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk membahas komitmen Pengadaan Barang/Jasa berlanjut ke dalam RAN OGI VII. 2023-2024. Di dalam rapat koordinasi tersebut, perwakilan ICW menyampaikan terkait kondisi informasi pengadaan darurat <i>existing</i> dan menyampaikan komponen yang perlu didorong untuk dimasukkan ke dalam kanal Pengadaan Barang/Jasa darurat tersebut.</p>	<p>Aktif</p>
--	---	---------------------

Komitmen 2

Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

Ukuran Keberhasilan 1:		
Laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti (target tingkat penyelesaian minimal 45% dari jumlah pengaduan pada tahun 2022).		
Kementerian PAN RB		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk Evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR kepada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). 2. Rapat kerja dengan stakeholders lainnya telah dilakukan dengan penekanan evaluasi pada: (1) Penyusunan SK Tim Pengelola; (2) Keaktifan akun K/L/D; (3) Jumlah laporan; (4) Status Tindak Lanjut; dan (5) Kualitas tindak lanjut. 3. Rencana kegiatan ke depan antara lain: (1) Meningkatkan sosialisasi; (2) Menyiapkan bahan sosialisasi; dan (3) Mendorong dilakukan evaluasi admin pada masing-masing instansi. 	
	Proses Ko-kreasi:	Aktif
	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PAN RB telah melibatkan UI CSGAR, UNDP, USAID. Kedepannya pembahasan penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik melibatkan stakeholder yang lebih luas termasuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). • PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan sumber daya. 	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat kerja dalam rangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PAN RB telah melaksanakan beberapa rangkain rapat kerja dengan kegiatan 	

<p>koordinasi dengan stakeholder.</p> <p>2. Jumlah pengaduan melalui SP4N-LAPOR! yang telah ditindaklanjuti sebanyak 40%.</p>	<p>berupa (1) Rapat kerja terkait Monev Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Pemda; (2) Rapat Penyusunan dan penandatanganan MoU SP4N-LAPOR; dan 3) FGD dengan organisasi penyandang disabilitas terkait penggunaan SP4N-LAPOR.</p> <p>2. Terkait jumlah laporan yang ditindaklanjuti, Kementerian PAN RB berhasil memenuhi jumlah laporan yang ditindaklanjuti dengan nilai sebesar 83% dari jumlah aduan yang diterima. Nilai yang ditindaklanjuti ini terdiri dari: 2% Laporan yang sedang dalam proses; 32% Laporan yang telah selesai; dan 49% Laporan yang telah diarsipkan.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan dana.</p>	Pasif
<p>Target B18:</p> <p>1. Surat Menteri PAN RB untuk Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR!</p> <p>2. Rapat Kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholders</p>	<p>Capaian Target</p> <p>1. Kementerian PANRB telah melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait untuk membahas lokus evaluasi dan pendampingan yang akan dilakukan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Laporan SP4N-LAPOR! yang telah diterima sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar 43.414 Laporan, dengan jumlah laporan yang telah ditindaklanjuti oleh SP4N-LAPOR! sebesar 33.220 Laporan, atau sebesar 76.52%</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Proses Kokreasi belum terlihat dalam pelaksanaan ukuran keberhasilan ini.</p>	Semi-Aktif



<p>Target B24:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder Jumlah pengaduan melalui SP4N LAPOR! yang telah ditindaklanjuti sebanyak 45% 	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan ditindaklanjuti oleh Kemen PANRB Tahun 2022 mencapai 84,46%. Laporan ditindaklanjuti terdiri dari laporan proses (6%), selesai (42,5%), dan diarsipkan (35%). Dalam pengembangan kedepan, laporan ditindaklanjuti diharapkan hanya laporan proses dan selesai atau laporan-laporan yang telah diverifikasi, dengan menghilangkan komponen diarsipkan, sebagaimana kesempatan rapat pengembangan terakhir yang dilakukan bersama dengan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi belum terlihat dilakukan secara aktif dalam pencapaian target ini.</p>	<p>Semi-Aktif</p>
<p>Ukuran Keberhasilan 2:</p> <p>Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022).</p>		
<p>Kementerian PAN RB</p>		
<p>Target B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah 	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Menteri PAN RB telah dikirimkan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang terhubung dengan SP4N-LAPOR! Kementerian PAN RB telah melakukan pendampingan di: (1) Aceh; (2) Kalimantan Timur; (3) Maluku Utara; (4) NTT; (5) Sulawesi Tenggara; (6) Sulawesi Selatan; (7) Kalimantan Utara; dan (8) Bali. Pendampingan dilakukan berdasarkan hasil Monev 2020, sehingga pemilihan instansi dilakukan berdasarkan performa pengelolaan. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p>	<p>Aktif</p>

terhubung dengan LAPOR!	Kementerian PAN RB telah melakukan kokreasi dengan OMS, tetapi belum melibatkan PATTIRO dalam proses kokreasi tersebut.	
Target B12: 1. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! 2. Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh lembaga pemerintah (25% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 40% laporan di tahun 2021).	Capaian Target: 1. Kementerian PAN RB telah melakukan pendampingan ke (1) Sulawesi Selatan; (2) Bangka Belitung; (3) Kalimantan Tengah; (4) Kota Palangkaraya; dan (5) Provinsi Bali. Pelatihan dilakukan baik sebagai bentuk Monev, Bimbingan Teknis, serta Training Operator pengelola SP4N-LAPOR di daerah. 2. Jumlah K/L/D yang berhasil menindaklanjuti laporan sebesar 70% atau 1.216 unit penyelenggara. Dengan jumlah Unit Penyelenggara yang berhasil menindaklanjuti sebesar 100% berjumlah 837 Unit Penyelenggara.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kementerian PAN RB dengan PATTIRO belum melakukan kokreasi terkait ukuran keberhasilan ini. Hal tersebut dibuktikan dari tidak adanya data yang mendukung bentuk kokreasi yang dilakukan antara PATTIRO dengan Kementerian PAN RB.	Pasif
Target B18: 1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D	Capaian Target Kementerian PANRB telah melaksanakan pendampingan ke sejumlah Pemerintah Daerah dan mendorong adanya kesepakatan bersama untuk meningkatkan layanan SP4N-LAPOR! dengan hal sebagai berikut: 1. Tidak mengembangkan aplikasi sejenis SP4N-LAPOR! di daerah untuk optimalisasi SP4N-LAPOR! 2. Mendorong penyusunan Renaksi SP4N-LAPOR! di daerah 3. Berkomitmen menindaklanjuti laporan SP4N-LAPOR!	Nilai: 100%

yang telah terhubung dengan LAPOR!	<p>4. Meningkatkan kapasitas anggota pengelola kaal SP4N-LAPOR!</p> <p>5. Proaktif dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SP4N-LAPOR!</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi</p> <p>Pendampingan terhadap Pemerintah Daerah belum melibatkan unsur masyarakat sipil untuk memberikan masukan serta pendapatnya atas implementasi SP4N-LAPOR! yang terdapat pada masing-masing Pemerintah Daerah.</p>	Semi-Aktif
<p>Target B24:</p> <p>1. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR!</p> <p>2. Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh lembaga pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022)</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Jumlah K/L/D yang telah melakukan tindak lanjut (proses, selesai, diarsipkan) pelaporan sebesar 458 (66,15%) dari 703 K/L/D. Jumlah K/L/D yang memiliki persentase Laporan Selesai sebesar 346 (49,2%).</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi dilaksanakan dengan turut hadirnya perwakilan Pattiro dalam Kegiatan Monev SP4N Lapor Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan Kementerian PANRB pada November 2022</p>	Aktif
PATTIRO		
<p>Target B06:</p> <p>1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>PATTIRO tidak melaksanakan pendampingan serta sosialisasi.</p>	Nilai: 0%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p>	Pasif

<p>dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan.</p> <p>2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat.</p>	<p>PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan dana.</p>	
<p>Target B12:</p> <p>1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan.</p> <p>2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>PATTIRO belum melaksanakan pendampingan secara langsung, tetapi sudah melakukan pemetaan terkait layanan pelaporan pengaduan pelayanan publik yang sudah terhubung dengan SP4N-LAPOR!.</p>	<p>Nilai:</p> <p>50%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>PATTIRO belum berkoordinasi secara langsung terkait pendampingan dan sosialisasi dengan Kementerian PAN RB. Namun telah melaksanakan rapat awal terkait strategi sosialisasi.</p>	<p>Pasif</p>
<p>Target B18:</p>	<p>Capaian Target:</p>	<p>Nilai: 0%</p>



<p>1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan.</p> <p>2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat.</p>	<p>Tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B18</p> <p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B18</p>	<p>Pasif</p>
<p>Target B24:</p> <p>1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. Perwakilan Pattiro turut hadir mendampingi Monev SP4N-LAPOR Pemda Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan Kementerian PANRB pada bulan November 2022.</p> <p>2. Sosialisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR telah dilakukan Pattiro melalui diadakannya Laporan Goes to Campus (LGTC) yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dengan mengundang narasumber perwakilan dari Kementerian PAN RB.</p>	

<p>penyampaian aduan.</p> <p>2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N Lapor</p>	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi dilaksanakan melalui keterlibatan Pattiro dalam kegiatan Monev SP4N LAPOR Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan diundangnya perwakilan Kementerian PANRB sebagai narasumber dalam LGTC sebagai sosialisasi pemanfaatan SP4N Lapor.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Ukuran Keberhasilan 3:</p> <p>Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik.</p>		
<p>Kementerian PAN RB</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi sudah dilakukan dengan USAID dan Detech. 2. Informasi yang sudah dibuka: (1) Statistik performa instansi; (2) Kategori laporan; (3) Wilayah laporan; dan (4) Klasifikasi laporan. 	<p>100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Rapat pengembangan fitur laporan data dan informasi belum melibatkan OMS, termasuk PATTIRO.</p>	<p>Pasif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Belum ada pembahasan secara khusus terkait pengembangan lapor dalam Rekapitulasi Laporan Data dan Informasi terkait pengaduan publik.</p>	<p>30%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Tidak ada proses kokreasi yang dilakukan antara Kementerian PAN RB dengan unsur Organisasi Masyarakat Sipil.</p>	<p>Pasif</p>
<p>Target B18:</p> <p>Pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian PANRB telah melaksanakan koordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait dengan migrasi data. Dalam koordinasi tersebut, Kementerian PANRB menjelaskan bahwa</p>	<p>Nilai: 100%</p>

terkait pengaduan publik	akan melaksanakan prioritas pengembangan fitur data sebagaimana dengan dummy yang telah dikerjakan pada periode sebelumnya.	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Proses Kokreasi antara Pemerintah - Organisasi Masyarakat Sipil belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan dari tidak adanya laporan dari OMS terkait dengan Ukuran Capaian ini.</p>	Semi-Aktif
<p>Target B24: Tersedianya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik dalam aplikasi SP4N-LAPOR! Yang diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh publik</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Fitur publikasi laporan ada pada laman https://www.lapor.go.id/statistik/klasifikasi-laporan dimana fitur ini baru dapat diakses apabila seseorang sudah memiliki akun SP4N Lapor. Operational maintenance dilakukan selama 2022 salah satunya untuk penyempurnaan dashboard publik.</p> <p>Fitur ini dapat diakses setelah <i>user</i> melakukan login, ketentuan ini didasari pertimbangan untuk mendorong masyarakat agar memiliki akun SP4N LAPOR yang selanjutnya dapat dianalisa karakteristik pengguna yang mengunduh dan memanfaatkan data publik tersebut.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi belum terlihat dalam pencapaian target ini.</p>	Semi-Aktif
PATTIRO		
<p>Target B06: Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>PATTIRO belum terlibat dalam pembahasan fitur laporan data dan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.</p>	Nilai: 0%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>PATTIRO belum diundang dalam rapat pembahasan pengembangan fitur laporan data dan informasi yang ingin dibuka.</p>	

terkait pengaduan publik.		
Target B12: Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	Capaian Target: Kementerian PAN RB belum mengundang PATTIRO untuk terlibat langsung dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: PATTIRO belum diundang dalam rapat pembahasan pengembangan fitur laporan data dan informasi yang ingin dibuka.	Pasif
Target B18: Kajian terkait rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik.	Capaian Target: Tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B18.	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B18.	Pasif
Target B24: Kajian data terkait rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik.	Capaian Target: PATTIRO tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B24.	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: PATTIRO tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B24.	Pasif

Komitmen 3

Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah

Ukuran Keberhasilan 1:		
Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.		
Kementerian PPN / BAPPENAS		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke daerah untuk memberikan masukan terkait pengembangan rencana aksi di Kota Semarang, Kab. Banggai, Kab. Sumbawa Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Seknas OGI. Dalam hal ini, Sekretariat SDI mengunjungi Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi NTB. Hasil kunjungan berupa asesmen awal terkait kesiapan Pemerintah Daerah dalam rencana aksi Satu Data Daerah, yang kemudian ditelaah lebih lanjut dalam asesmen lanjutan di B12.	Aktif
	Proses Kokreasi:	
	1. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat SDI kedepannya diharapkan mengedepankan proses kokreasi untuk daerah Riau, NTB, dan Jawa Timur. 2. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat OGI telah melibatkan OMS untuk daerah Provinsi NTB, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Pendampingan dalam pembentukan rencana aksi di tingkat daerah	Pendampingan dilakukan dalam bentuk: 1. Sekretariat SDI melakukan asesmen untuk menilai kesiapan daerah dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI. Hasil asesmen tersebut digunakan sebagai	



<p>melalui pilot project di beberapa daerah Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.</p>	<p>dasar menyusun rencana aksi Satu Data di masing-masing daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Asesmen tersebut menekankan pada 7 aspek kesiapan daerah meliputi adanya penyusunan regulasi penyelenggaraan SDI daerah, manajemen data, pengelolaan portal, hingga kesiapan data dan infrastruktur untuk Integrasi Portal Daerah ke Portal SDI. Dari segi 7 aspek tersebut, Kota Semarang menunjukkan kesiapan yang paling baik karena hampir semua aspek telah dipenuhi. 3. Sebagai bagian dari persiapan ini, Pemda Riau dan Media Link melakukan mini workshop penyusunan standarisasi data sektoral pada 7 daerah pilot project—yang menjelaskan Standarisasi Data, Integrasi Data Pusat dan Daerah dalam Skema SDI. Hal serupa juga dilakukan oleh pemda lainnya bersama OMS misalnya Provinsi NTB dengan PWYP dan Somasi NTB selaku mitra OMS. 	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Rapat koordinasi asesmen penyelenggaraan SDI di 7 wilayah piloting project telah dilakukan bersama OMS.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18: Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui Pilot Project di Provinsi NTB, RIAu, JAwa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sumbawa Barat</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Satu Data Indonesia telah menyampaikan hasil pelaksanaan asesmen terhadap 7 wilayah <i>pilot project</i> dalam aksi ini secara terpisah. 2. Sekretariat Satu Data bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan 7 Pemerintah Daerah <i>pilot project</i> telah melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Satu Data bersama dalam rangka menyiapkan Pemerintah Daerah dalam implementasi Satu Data Daerah. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses Kokreasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Sekretariat Satu Data Indonesia bersama dengan OMS. Sekretariat Satu Data Indonesia telah melibatkan OMS dalam penyusunan Rencana</p>	<p>Aktif</p>



	Aksi Daerah hingga pembagian tugas dalam implementasi Rencana Aksi Daerah Satu Data Daerah.	
Target B24: Implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Capaian Target: Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) telah menyusun rencana aksi Satu Data Indonesia pada tingkat daerah sesuai dengan daerah pilot. Penyusunan dilakukan secara kokreasi dengan CSO mitra dan Pemerintah Daerah. Rencana aksi telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan terkini dari Pemerintah Daerah. Sebagai catatan, SDI perlu untuk segera menyelesaikan hasil <i>assesment</i> terkini dan menetapkan Pemerintah Daerah <i>pilot</i> mana saja yang sudah siap untuk dilakukan peluncuran.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses ko-kreasi telah dilaksanakan SDI untuk pembagian tugas dalam implementasi Rencana Aksi Daerah Satu Data Daerah.	Aktif
Media Link		
Target B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Capaian Target: Pendampingan telah dilaksanakan oleh Media Link.	Nilai: 75%
	Proses Ko-kreasi: 1. Media Link memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan pendampingan di Kabupaten Banggai. 2. Dalam mendampingi Pemda (Riau dan Jawa Timur), Media link belum dilibatkan SDI sehingga Media Link berkoordinasi langsung dengan Pemda.	Semi Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

<p>Pendampingan penetapan rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi Riau, Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.</p>	<p>Pendampingan telah dilaksanakan dengan memetakan tantangan di masing-masing daerah <i>pilot project</i>.</p> <p>Proses Ko-kreasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media Link telah melakukan pendampingan dengan catatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tantangan di Provinsi Jawa Timur: forum data sulit dibentuk. b. Tantangan di Provinsi Riau: <ul style="list-style-type: none"> • Data prioritas sektoral terkait SDA masih sulit dikumpulkan, portal data masih berisi ringkasan informasi. • Data keuangan belum ada panduan dari pusat. • Keterlibatan masyarakat sipil masih minim di tahap produksi data. 2. Media Link mendorong terciptanya kebijakan satu data dengan memperhatikan pelibatan masyarakat dan kokreasi dalam setiap prosesnya serta menjadikan satu data sebagai acuan dalam melakukan pengawasan yang efektif. 3. Untuk Kabupaten Banggai dan Kabupaten Brebes, pendampingan yang telah dilakukan Media Link adalah dalam pembuatan rencana aksi satu data. 	<p style="text-align: center;">Aktif</p>
<p>Target B18: Pendampingan implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di Provinsi Riau, Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.</p>	<p>Capaian Target: Telah mengikuti pendampingan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Daerah.</p> <p>Proses Ko-kreasi: Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah, CSO dengan Sekretariat SDI melakukan penyusunan secara bersama-sama melalui meeting yang difasilitasi Sekretariat OGI.</p>	<p style="text-align: center;">Nilai: 100%</p> <p style="text-align: center;">Aktif</p>

Target B24: Pendampingan evaluasi dan monitoring rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Brebes.	Capaian Target: Pendampingan rencana aksi satu data daerah telah dilaksanakan di Jawa Timur dan Riau, akan tetapi berdasarkan koordinasi dengan SDI Bappenas kegiatan evaluasi bersama belum dapat dilaksanakan.	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Telah terdapat koordinasi antara MediaLink dengan SDI untuk proses evaluasi dan monitoring, namun kegiatan evaluasi bersama belum dapat dilakukan.	Aktif
Publish What You Pay (PWYP)		
Target B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB.	Capaian Target: PWYP sudah mendampingi provinsi NTB bersama dengan Sekretariat OGI.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PWYP sudah mendampingi provinsi NTB bersama dengan Sekretariat OGI.	Aktif
Target B12: Pendampingan penetapan rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB.	Capaian Target: PWYP telah melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. PWYP telah melakukan pendampingan dengan catatan sebagai berikut: Strategi yang harus dilakukan untuk mempercepat penetapan Rencana Aksi Satu data NTB adalah dengan segera menetapkan Pergub Satu data NTB, dan setelahnya penyusunan rencana aksi dapat dilakukan secepatnya. 2. PWYP telah bekerjasama dengan SDI dalam melakukan pendampingan pada Pemprov NTB melalui pelaksanaan asesmen untuk menilai kesiapannya dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI. 	Aktif

Target B18: Pendampingan implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di Provinsi NTB	Capaian Target: Telah mengikuti pendampingan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Daerah	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah, CSO dengan Sekretariat SDI melakukan penyusunan secara bersama-sama melalui meeting yang difasilitasi Sekretariat OGI	Aktif
Target B24: Pendampingan evaluasi dan monitoring rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Brebes.	Capaian Target: Pendampingan rencana aksi satu data daerah telah dilaksanakan di NTB, akan tetapi untuk B24 PWYP tidak mengumpulkan data dukung.	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah, CSO dengan Sekretariat SDI melakukan penyusunan secara bersama-sama melalui meeting yang difasilitasi Sekretariat OGI.	Aktif
Transparency International Indonesia (TII)		
Target B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Kota Semarang.	Capaian Target: TII sudah mendampingi Kota Semarang bersama dengan Sekretariat OGI.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: TII sudah mendampingi Kota Semarang bersama dengan Sekretariat OGI.	Aktif
Target B12: Pendampingan penetapan	Capaian Target: TII telah bekerjasama dengan SDI dalam melakukan pendampingan pada Pemkot Semarang	Nilai: 100%



rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Kota Semarang.	melalui pelaksanaan asesmen untuk menilai kesiapannya dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI.	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>TII telah melakukan pendampingan di Kota Semarang dengan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan temuan sementara, terlalu banyak aplikasi dalam pengelolaan data bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah pusat. • Persoalannya, aplikasi yang tersedia tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem satu data di Kota Semarang. Perkembangan baik dalam pengelolaan data dalam Dashboard Vaksin, Pemerintah Kota Semarang memberikan informasi yang sangat detail dalam Dashboard Vaksin. 	Aktif
Target B18: Pendampingan implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di Kota Semarang	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah mengikuti pendampingan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Daerah</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah, CSO dengan Sekretariat SDI melakukan penyusunan secara bersama-sama melalui meeting yang difasilitasi Sekretariat OGI</p>	Aktif
Target B24: Pendampingan evaluasi dan monitoring rencana aksi Satu Data Indonesia di	<p>Capaian Target:</p> <p>Pendampingan rencana aksi satu data daerah telah dilaksanakan di Semarang, akan tetapi kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilakukan karena kurangnya support.</p>	Nilai: 0%



<p>tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Brebes.</p>	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah, CSO dengan Sekretariat SDI melakukan penyusunan secara bersama-sama melalui meeting yang difasilitasi Sekretariat OGI</p>	<p>Aktif</p>
--	--	---------------------



Komitmen 4
Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Ukuran Keberhasilan 1:		
Menguatnya kapasitas masyarakat dan pendamping desa untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.		
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT)		
Target B06: Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: -
Target B12: Tidak ada target B12.		Nilai: -
Target B18: Fasilitasi untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Masyarakat dan Pendamping Desa	Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pendamping desa untuk mendukung uji coba Program Review Berbasis Masyarakat. Kedepannya Kementerian Desa PDTT dapat terus terlibat dalam pengembangan konsep ini agar selaras dan saling melengkapi dengan konsep akuntabilitas sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT dalam platform Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kementerian Desa PDTT telah melaksanakan Kokreasi dengan Yayasan TIFA secara aktif. Kokreasi dilakukan mulai dari penentuan desa piloting, hingga implementasi program	Aktif



Target B24: Diseminasi hasil pembelajaran dari evaluasi pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah mengikuti diseminasi pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat pada Agustus 2022 dimana hasil tindak lanjutnya adalah akan ada koordinasi dengan OMS di isu serupa dan komitmen ini akan diteruskan oleh Yayasan Tifa pada RAN OGI VII 2023-2024	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dilaksanakan Kementerian Desa PDTT dengan mengikuti proses diseminasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa	Aktif
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06: Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: -
Target B12: Tidak ada target B12.		Nilai:-
Target B18: Fasilitas untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD	Capaian Target: Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD terkait dengan pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses Kokreasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Organisasi Masyarakat Sipil belum dilaksanakan maksimal. Program Bimtek belum melibatkan elemen OMS.	Semi-Aktif
Target B24: Tidak ada target B24	Capaian Target: Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa, maka tidak ada Target Capaian di periode ini.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi:	N/A



Yayasan Tifa		
Target B06: Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: -
Target B12: Sosialisasi dan pelatihan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat bagi Kepala Desa, aparat pemerintah desa, masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping desa.	Capaian Target: Desa yang ditetapkan sebagai <i>pilot project</i> adalah Desa Guwosari dan Desa Sriharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi telah dilakukan dengan dua metode, yaitu secara daring dan luring.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Yayasan Tifa bersama Atmawidya Alterasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa PDTT terkait kegiatan sosialisasi yang akan dihadiri oleh Kepala dan Perangkat Desa; Warga Desa; Anggota BPD, serta Pendamping Lokal Desa.	Aktif
Target B18: Terlaksananya bimbingan teknis Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Capaian Target: Yayasan TIFA telah melaksanakan bimbingan teknis terkait Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat. Dikarenakan kendala mobilitas selama pandemi, Yayasan TIFA dibantu oleh mitra Yayasan Tifa yang ada di Yogyakarta, Atmawidya Alterasi. Bimbingan Teknis juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Desa PDTT.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Yayasan TIFA telah melibatkan Kementerian Desa PDTT dalam pelaksanaan Evaluasi Program pembangunan Berbasis Masyarakat. Pelibatan dalam bentuk undangan serta penentuan desa <i>pilot project</i> .	Aktif

Target B24: Tidak ada target B24	Capaian Target: Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka tidak ada Capaian Target di periode ini.	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi	N/A
Ukuran Keberhasilan 2: Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di dua desa.		
Kementerian Desa PDTT		
Target B06: 1. Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat. 2. Rekomendasi penetapan lokasi desa untuk pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan <i>pilot project bersama Yayasan TIFA sebagai lead implementer</i> Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kokreasi telah terjadi dengan adanya koordinasi antara Kementerian Desa PDTT dan Yayasan TIFA.	Aktif
Target B12: Tidak ada target B12.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: - -
Target B18: Fasilitas Pelaksanaan Pilot	Capaian Target: Kemendesa PDTT bersama dengan Yayasan TIFA telah melakukan fasilitas kegiatan Evaluasi	Nilai: 100%



Project evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut Kemendesa PDTT hadir untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan tersebut.	
	Proses Ko-kreasi: Proses Kokreasi antara Kemendesa PDTT dengan Yayasan TIFA sudah berjalan dengan baik. Kokreasi dilakukan sejak penentuan desa pilot project hingga implementasi pelaksanaan program	Aktif
Target B24: Tidak ada target B24	Capaian Target: Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa, maka tidak ada Capaian Target di periode ini.	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi	N/A
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06: Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: -
		-
Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	Capaian Target: Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam komitmen ini terkait persiapan <i>pilot project</i> Evaluasi Program Pembangunan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Rapat koordinasi dilaksanakan bersama Kementerian Desa PDTT dan Yayasan TIFA sebagai stakeholder terkait dalam komitmen ini.	Aktif
Target B18: Fasilitas untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Kepala	Capaian Target: Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD. Namun, sosialisasi tersebut belum dilaksanakan pada desa	Nilai: 100%



Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD	yang menjadi <i>Pilot Project</i> dalam komitmen bersama Yayasan TIFA dan Kementerian Desa PDTT	
	Proses Ko-kreasi: Kementerian Dalam Negeri belum melaksanakan Kokreasi dengan Yayasan TIFA maupun Kementerian Desa PDTT. Hal tersebut tergambar dari belum dilaksanakannya sosialisasi pada Aparatur Desa <i>Pilot Project</i> pada Komitmen ini.	Pasif
Target B24: Tidak ada target B24	Capaian Target Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa, maka tidak ada Capaian Target di periode ini.	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi:	N/A
Yayasan Tifa		
Target B06: Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa.	Capaian Target: Penetapan <i>pilot project</i> akan dilakukan pada B12.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: 1. Yayasan Tifa bersama Kemendes PDTT telah melakukan koordinasi persiapan dan penetapan 2 desa pilot project. 2. Namun mengacu pada surat yang dikirimkan oleh Yayasan TIFA kepada sekretariat OGI, capaian B06 terkait pemilihan desa akan dimundurkan ke B12.	Semi Aktif
Target B12: 1. Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa.	Capaian Target: Yayasan TIFA telah melakukan persiapan untuk kegiatan ujicoba, sosialisasi, dan pelatihan terkait penyelenggaraan program review di Kabupaten Bantul.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Desa yang terpilih sebagai <i>pilot project</i> yaitu Desa Guwosari dan Desa Sriharjo Kabupaten Bantul,	Aktif



<p>2. Terpilihnya desa yang merupakan hasil koordinasi dari K/L dan Yayasan TIFA.</p>	<p>berupa koordinasi, ujicoba, sosialisasi, dan pelatihan tahap I program review secara daring dan luring bersama Japan Initiative dan Atmawidya Alterasi Indonesia, dengan dihadiri Kepala dan Perangkat Desa; Warga Desa; Anggota BPD, serta Pendamping Lokal Desa.</p>	
<p>Target B18:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pilot Project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Review 	<p>Capaian Target:</p> <p>Yayasan TIFA telah melaksanakan Uji Coba Program Review. Metode pelaksanaan Program Review mereplikasi pelaksanaan di Jepang, dari dua Desa percontohan metode tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Adapun catatan lainnya, meskipun disambut baik oleh masyarakat dan Pemdes karena menghadirkan diskusi dan evaluasi yang terbuka, perlu dilakukan pengawasan terkait tindak lanjut dari hasil Program Review ini, khususnya dari Lurah ke tingkat Kabupaten. Kedepannya TIFA dapat berkoordinasi dengan Kemendesa PDTT terkait replikasi Program Review di Desa lainnya.</p> <p>Yayasan TIFA telah melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan Uji Coba Program Review di dua Desa percontohan. Kedepannya TIFA dapat mengembangkan sebuah modul terkait implementasi Program Review yang telah disesuaikan dengan konteks pelaksanaan di Indonesia sesuai dengan pengalaman uji coba. Modul ini juga dapat digunakan untuk melaksanakan Uji Coba lanjutan di Desa lainnya</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B24: Diseminasi hasil pembelajaran dari evaluasi pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Yayasan Tifa telah melakukan diseminasi dan seminar diseminasi Program Review (Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat) pada Agustus 2022, kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasi hasil uji coba Program Review dan hasil pembelajaran baik dari proses pendampingan</p>	<p>Nilai: 100%</p>



Masyarakat.	dan pelaksanaan Program Review. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan Bappenas.	
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dilakukan dengan keterlibatan Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan Bappenas dalam acara seminar diseminasi evaluasi program pembangunan berbasis masyarakat.	Aktif

Komitmen 5

Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal

Ukuran Keberhasilan 1:		
Terlaksananya diseminasi "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal"		
Lembaga Administrasi Negara		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Diseminasi pada tahap <i>diagnose/design</i> kegiatan Laboratorium Inovasi (4 daerah).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah melakukan diseminasi tahap <i>diagnose/design</i> kegiatan Laboratorium Inovasi di 4 daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kab. Kepulauan Tanimbar. b. Kab. Lombok Utara. c. Kab. Tojo Una-Una. d. Kab. Sorong. 2. Bahan diseminasi menggunakan bahan terkait inovasi layanan publik yang disiapkan oleh LAN dan diperkaya dengan bahan terkait layanan publik bagi kelompok Marjinal dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (Lakpesdam PBNU). 	
	Proses Ko-kreasi: LAN telah melakukan koordinasi dengan Lakpesdam PBNU mengenai bahan yang akan didiseminasikan pada kegiatan Laboratorium Inovasi di 4 daerah.	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Penyusunan Laporan hasil Diseminasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAN telah menyusun laporan pelaksanaan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal yang menjelaskan progres pelaksanaan laboratorium di 4 lokus 2. Kelompok sasaran inovasi terdiri atas perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat miskin, orang dengan disabilitas, masyarakat dengan yang kesulitan karena kondisi geografis, serta masyarakat lansia, baik dari sektor sosial, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, penataan ruang, dan ketenagakerjaan. 	



	<p>3. Terdapat 19 inovasi di 4 lokus kelompok marjinal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kabupaten Kepulauan Tanimbar Inovasi untuk kelompok marjinal (termasuk yang marjinal karena akses) yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat 5 inovasi. Inovasi-inovasi tersebut dihasilkan oleh Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMMD); dan Dinas Pendidikan.b. Kab. Lombok Utara Jumlah inovasi untuk kelompok marjinal yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebanyak 7 inovasi. Dinas atau unit kerja pengusul inovasi untuk kelompok marjinal juga variatif, yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; DP2KBPMMD; Rumah Sakit Umum Daerah; dan Puskesmas.c. Kab. Tojo Una-Una Jumlah inovasi yang dihasilkan untuk kelompok marjinal sebanyak 5 inovasi. Inovasi-inovasi tersebut berasal dari Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat; Puskesmas; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan DP2KBPMMD.d. Kab. Sorong Ada 2 inovasi untuk kelompok marjinal yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Proses pelaksanaan dan penyusunan laporan telah melibatkan Lakpesdam PBNU yang memberikan</p>	<p>Aktif</p>



	materi terkait kelompok marjinal dalam penyusunan bahan paparan untuk laboratorium inovasi.	
Target B18: Diseminasi pada tahap diagnose/design kegiatan Laboratorium Inovasi (4 Daerah)	Capaian Target: Lembaga Administrasi negara telah melaksanakan Diseminasi pada tahap Diagnose di 4 Daerah, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Merauke. Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode <i>blended learning</i> dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam hal ini Lakpesdam PBNU untuk memberikan pengantar terkait Inovasi Pelayanan Publik bagi kelompok Marjinal.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses Kokreasi telah dilaksanakan dengan baik oleh LAN dengan melibatkan Lakpesdam PBNU untuk memberikan paparan mengenai inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal, serta melibatkan Lakpesdam PBNU dalam sesi <i>coaching clinic</i> .	Aktif
Target B24: Penyusunan Laporan hasil Diseminasi	Capaian Target: Lembaga Administrasi Negara telah melakukan diseminasi pengembangan inovasi pelayanan publik bagi kelompok marjinal kepada empat Pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Merauke. Hasil dari diseminasi yang diikutkan dalam program Laboratorium Inovasi telah menghasilkan total 35 Inovasi bagi kelompok marjinal, adapun rincian masing-masing wilayah, yaitu: Timor Tengah Selatan: 11 Bulukumba: 10 Nias Utara: 11 Merauke: 3	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi Mitra OMS yakni Lakpesdam PBNU mengundurkan diri dari RAN OGI pada implementasi B24.	N/A



Lakpesdam PBNU		
Target B06: Ekspos hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marjinal untuk LAN.	Capaian Target: Lakpesdam PBNU telah memaparkan hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marjinal kepada LAN.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Paparan dari Lakpesdam PBNU digunakan oleh LAN untuk dipaparkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 4 daerah pendampingan.	Aktif
Target B12: Pemetaan dan perumusan materi strategi pendampingan.	Capaian Target: Dari 4 (empat) wilayah yang mendapat pendampingan dari Laboratorium Inovasi (Labinov) LAN tahun 2020-2022 yakni Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tojo Uno-Uno. Terpetakan 8 (delapan) kluster inovasi layanan untuk kelompok marginal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Kluster disabilitas yakni Care ODD (Peduli Orang Dengan Disabilitas) di Kepulauan Tanimbar; b. Kluster anak yakni KUBE APUS (Kelompok Usaha Bersama Anak Putus Sekolah) dan ADAUT (Ada Rumah Pintar) di Kepulauan Tanimbar, Bersinergi dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak dan Stunting di Lombok Utara, dan Satgas KIBBAR (Satuan Tugas Kesehatan Ibu, Balita, Anak, dan Remaja) di Tojo Una-Una; c. Kluster perempuan yang merangkul perempuan korban kekerasan dan perempuan miskin serta perempuan sebagai kelompok marginal dalam aspek sosial politik kemasyarakatan seperti Peta Daya Perempuan Tanimbar Berdaya di Kepulauan Tanimbar, Budame Miskin (budidaya udang Vaname sistem kolam bundar bagi perempuan miskin pesisir Kabupaten Lombok Utara) serta Berugak Perempuan di Lombok Utara; 	Nilai: 100%



	<ul style="list-style-type: none"> d. Kluster masyarakat adat seperti Kokore Kodara (Kokore Ko Sodara) di Sorong; e. Kluster PMKS seperti Satgas PMKS (Satuan Petugas Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) di Lombok Utara; f. Kluster masyarakat pulau terpencil seperti Nyatfar Kreatif di Lombok Utara dan Dokter Masuk Pulau di Tojo Una-Una; g. Kluster lansia seperti KelasTeras (Kelompok Lansia Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional) di Lombok Utara dan Gerakan Cinta Lansia di Tojo Una-Una; dan h. Kluster masyarakat miskin seperti Si Abang Tersipu (Sistem Informasi Bangunan Terintegrasi Sistem Informasi Penduduk Miskin) di Tojo Una-Una. 	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Beragam strategi bisa ditempuh dalam pendampingan kelompok marginal sehingga inovasi yang dilakukan dapat terwujud dan tepat sasaran. Strategi yang dimaksud antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemetaan aktor-aktor yang bisa mendukung inovasi oleh OPD terkait. b. sinergi sesama dinas terkait untuk mengatasi keterbatasan nomenklatur dan keterbatasan birokrasi lainnya. c. kolaborasi dengan komunitas atau organisasi setempat untuk mencapai tujuan mutlak dilakukan agar inovasi layanan dapat mencapai tujuan. 	Aktif
<p>Target B18: Pemantauan Pendampingan</p>	<p>Capaian Target</p> <p>Lakpesdam PBNU ikut terlibat dalam rangkaian <i>coaching clinic diagnose</i> Laboratorium Inovasi yang diselenggarakan oleh LAN. Adapun catatan dari pemantauan yang dilaksanakan oleh Lakpesdam PBNU adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi dari unsur masyarakat yang lebih luas untuk inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. 	<p>Nilai: 100%</p>



	<p>2. Kurangnya pemahaman dari Pemerintah Daerah terkait kelompok marjinal yang menjadi sasaran pelayanan publik.</p> <p>3. Inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah belum banyak menjadikan kelompok marjinal sebagai salah satu targetnya.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Lakpesdam PBNU telah melaksanakan Kokreasi dengan baik bersama dengan LAN. Berdasarkan hasil pemantauan, Lakpesdam PBNU aktif dalam mendorong OPD untuk menyiapkan Inovasi Pelayanan Publik bagi kelompok marjinal.</p>	Aktif
Target B24: Penyusunan laporan pendampingan	<p>Capaian Administratif:</p> <p>Lakpesdam PBNU mengundurkan diri dari implementasi RAN OGI VI</p>	Nilai: N/A
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Lakpesdam PBNU mengundurkan diri dari implementasi RAN OGI VI</p>	N/A

Komitmen 6

Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Ditjen PAS Kemenkumham, dan Polri.		
Mahkamah Agung		
Target B06: 1. Surat Keputusan Dirjen Badilag dan Keputusan Dirjen Badilum tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. 2. Pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Capaian Target: MA telah menyusun Peraturan Teknis dalam Keputusan Dirjen Badilag (Badan Peradilan Agama) dan Keputusan Dirjen Badilum (Badan Peradilan Umum) tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam proses pemenuhan B06, MA telah melibatkan unsur non-pemerintah, yakni Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) untuk memberikan masukan dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak. Dirjen Badilag bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyusun SK Ditjen Badilag.	Aktif

<p>Target B12:</p> <p>Draft SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badimiltun) terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah disusunnya Draft SK Ditjen Badimiltun terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Badimiltun telah melakukan MoU dengan Sabda untuk mengirimkan pelatihan pada Aparat Penegak Hukum, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana bagi disabilitas.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>1. SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah tersedia SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, capaian administratif hanya mencapai 70% karena SE Sekretaris Mahkamah Agung masih dalam pembahasan pimpinan.</p>	<p>Nilai: 70%</p>
<p>2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung</p>	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam penyusunan SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, MA telah melibatkan Sabda.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B24:</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SE Sekretaris Mahkamah Agung</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Berdasarkan diskusi antar Ditjen Mahkamah Agung, Mahkamah Agung tidak akan menerbitkan SE SekMA, karena masing-masing Dirjen sudah menerbitkan</p>	<p>Nilai: 70%</p>



terkait pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	<p>SK masing-masing, dan yang melakukan Monev sesuai SK adalah masing-masing Ditjen.</p> <p>Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah mengumpulkan data dukung berupa laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SK Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, telah tersedia sarana dan prasarana di Peradilan Agama Mahkamah Agung, namun sarana dan prasarana tersebut masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih dan koordinasi antar bidang terkait MA untuk anggaran dan waktu pelaksanaan.</p> <p>Oleh karena itu, meskipun tidak ada SE SekMA yang diterbitkan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi SK Ditjen Badilag masih sesuai dengan ukuran keberhasilan Komitmen 6, sehingga masih mendapatkan penilaian.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Mahkamah Agung tidak melakukan kokreasi dengan masyarakat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>	Pasif
Kejaksanaan Agung		



Target B06: Penyusunan draft pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Capaian Target: Kejari telah mengumpulkan draft pemetaan yang berisikan: a. Hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. b. Cara mewujudkan pengadilan yang inklusif.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: 1. Indonesia Judicial Research Society (IJS) sudah dilibatkan dalam mediasi terkait pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan. 2. IJS sudah masuk dalam Pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021.	Aktif
Target B12: Kajian terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.	Capaian Target: 1. Kejaksaan RI telah menghasilkan kajian terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan. 2. Kajian yang dihasilkan berisi: a. asesmen kebutuhan akomodasi, hambatan yang sering dialami oleh penyandang disabilitas saat proses prapenuntutan hingga penuntutan; dan b. mekanisme yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui peradilan inklusif guna terwujudnya pengakuan penyandang disabilitas sebagai pihak yang setara saat berhadapan dengan hukum di dalam proses penuntutan.	Nilai: 100%

	<p>Proses Kokreasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJRS sudah dilibatkan dalam mediasi terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan. 2. IJRS sudah masuk dalam pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021. 	Aktif
<p>Target B18 Penyusunan draft Peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas</p>	<p>Capaian Target</p> <p>Kejaksaan Agung sudah mengumpulkan draft Peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kejaksaan Agung telah melibatkan IJRS dalam diskusi terkait draft Peraturan.</p>	Aktif
<p>Target B24: Tersedianya peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kejaksaan Agung telah menyelesaikan draf peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, yang semula masih dalam proses penyusunan di periode B18. Namun, draf tersebut belum dapat diterbitkan sebagai peraturan pada periode RAN OGI VI 2020-2022 karena harus melalui proses di Biro Hukum. Oleh karena itu, nilai capaian untuk target ini adalah 75.</p>	Nilai: 75%

	Kejaksanaan Agung akan menerbitkan peraturan teknis ini pada tahun 2023, dan pelaksanaannya akan dilanjutkan pada RAN OGI VII Tahun 2023-2024.	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kejaksanaan Agung telah melibatkan OMS Sektor Keadilan dalam penyusunan draf Peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	Aktif
Ditjen PAS Kemenkumham		
<p>Target B06:</p> <p>Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah tersedia SOP dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Lembaga masyarakat.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam proses pemenuhan B06 telah melibatkan unsur non-pemerintah, yaitu Asia Foundation dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII dalam proses pembuatan kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana akomodasi yang layak.</p>	Aktif



<p>Target B12:</p> <p>Tersedianya peraturan teknis terkait dengan SOP dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Lembaga pemsyarakatan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dibentuknya <i>piloting</i> Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemsyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat persiapan tentang Bimbingan Teknis. b. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas bagi Petugas Pemsyarakatan diikuti oleh perwakilan Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat Keamanan dan Ketertiban, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, dan The Asia Foundation. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis dengan PUSHAM UII dan The Asia Foundation.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga pemsyarakatan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dilaksanakan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak sesuai dengan peraturan teknis yang dibuat mengenai ULD pada UPT Pemsyarakatan. Juga telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait peraturan yang sebelumnya disusun.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p>	<p>N/A</p>



	Untuk B18, Ditjenpas tidak melaporkan apakah pencapaian target dilakukan dengan proses kokreasi.	
Target B24: Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	Capaian Target: Ditjenpas telah mengumpulkan data dukung berupa laporan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Asesmen ini dilakukan pada 40 UPT <i>Piloting</i> Pelaksana Layanan Unit Disabilitas. Berdasarkan asesmen tersebut, masih perlu ada penganggaran tambahan untuk mewujudkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di UPT Pemasaryakatan serta dukungan pembinaan dan pendampingan SDM dari lembaga eksternal, termasuk organisasi yang bergerak di bidang disabilitas. Selain itu, Ditjenpas telah menetapkan 20 UPT <i>Piloting</i> penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas di 20 UPT lainnya untuk periode 2023-2024.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Ditjenpas melibatkan Pusham UII dalam penyusunan kebijakan dan bimbingan teknis, namun tidak dalam proses asesmen.	Pasif
Kepolisian Republik Indonesia		
Target B06: 1. Penyusunan SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang	Capaian Target: 1. Telah tersusun SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak. 2. Telah tersusun buku panduan bagi penyidik terkait kebutuhan akomodasi	Nilai: 0%



<p>layak bagi penyandang disabilitas.</p> <p>2. Penyusunan panduan penyidik kebutuhan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>yang layak bagi penyandang disabilitas.</p> <p>Namun, Kepolisian RI tidak mengumpulkan data dukung.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam penyusunan SOP Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>1. Tersedianya SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. Telah tersedia SOP pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p> <p>2. Telah tersedia Buku Panduan terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	Nilai: 100%
<p>2. Tersedianya panduan penyidik kebutuhan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam penyusunan SOP Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Penyusunan Peraturan Kabareskrim Polri terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah tersusunnya draft Peraturan Kabareskrim tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum di Kepolisian.</p>	Nilai: 100%



	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Kepolisian RI juga dibantu oleh UII dan AIPJ dalam penyusunan draft Peraturan.</p>	Aktif
<p>Target B24: Tersedianya Peraturan Kabareskrim Polri terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kepolisian RI telah melanjutkan ko-kreasi dengan UII dan AIPJ untuk menyusun draf Peraturan, namun Kepolisian RI belum menyelesaikan Peraturan tersebut dan tidak mengumpulkan laporan dan data dukung pada periode B24.</p>	Nilai: 0%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kepolisian RI telah melakukan ko-kreasi dengan Pusham UII dan AIPJ untuk menyusun draf Peraturan.</p>	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
<p>Target B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterlibatan dalam proses pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga (K/L). Tersedianya masukan terhadap pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di K/L. 	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> IJRS telah terlibat dalam proses pemetaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI. Masukan IJRS terhadap pemetaan ialah sebagai berikut: hambatan paling banyak adalah dari luar individu penyandang disabilitas, yaitu dari lingkungannya, infrastruktur, paradigma masyarakat hingga budaya hukum yang belum mengakomodir kebutuhan. 	Nilai:100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>IJRS menjadi bagian dari tim pemetaan yang dibuktikan melalui SK Kejaksaan Agung No. 166 Tahun 2021.</p>	Aktif



<p>Target B12: Keterlibatan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di K/L.</p>	<p>Capaian Target: IJRS sudah dilibatkan dalam mediasi terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi: 1. IJRS sudah masuk dalam Pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021. 2. IJRS belum mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya: Polri, MA, Lapas.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18: Keterlibatan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga</p>	<p>Capaian Target: IJRS sudah dilibatkan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas oleh Kejaksaan Agung.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi: 1. IJRS sudah dilibatkan dalam diskusi bersama Kejaksaan Agung</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B24: Kajian dan asistensi terkait asesmen kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga</p>	<p>Capaian Target: IJRS telah mengumpulkan data dukung berupa kajian mengenai asesmen akomodasi yang layak dalam penanganan perkara bagi penyandang disabilitas di tahap penuntutan Kejaksaan. Selain itu, IJRS juga telah terlibat dalam asistensi untuk mendorong penyempurnaan pedoman Kejaksaan Agung dengan menjadi salah satu anggota POKJA Akses Keadilan pada Kejaksaan Agung.</p>	<p>Nilai: 100%</p>



	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>IJRS telah dilibatkan dalam ko-kreasi oleh Kejaksaan Agung dalam melakukan penyempurnaan peraturan teknis Kejaksaan Agung.</p>	Aktif
--	--	--------------



Komitmen 7

Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum

Ukuran Keberhasilan 1:		
Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi		
Mahkamah Agung		
Target B06: Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara Kementerian/Lembaga (K/L).	Capaian Target: 1. Mahkamah Agung (MA) RI telah memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) disamping beberapa sistem aplikasi berbasis web lainnya. 2. MA dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham telah memiliki MoU terkait portal informasi bersama di tahun 2016. 3. Sebagai bentuk tindak lanjut MoU tersebut, BPHN telah mengadakan rapat diskusi peninjauan revitalisasi kerja sama dengan MA di awal tahun 2021.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS belum dilibatkan dalam proses kokreasi	Pasif
Target B12: Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Capaian Target: 1. Telah ada rapat koordinasi Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badimiltun) MA dengan BPHN yang mendiskusikan rancangan pengembangan portal informasi, dengan fokus mengenai langkah persiapan point-point informasi yang dapat menjadi konsumsi publik berkaitan dengan Bantuan Hukum serta langkah-langkah pengintegrasian.	Nilai: 100%

	<p>2. Perlu ada koordinasi di dalam internal antara MA untuk menyepakati pengembangan portal ini.</p>	
	<p>Proses Kokreasi: OMS belum dilibatkan.</p>	Pasif
<p>Target B18: Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi</p>	<p>Capaian Target: Mahkamah Agung RI telah mengidentifikasi portal apa yang sudah ada saat ini dan melakukan diskusi dengan BPHN untuk mendiskusikan hal-hal yang dapat dimuat dalam portal informasi Bantuan Hukum. Namun, capaian ini hanya mendapat nilai administratif 50 karena belum tercapai kesepakatan antar pihak dan portal informasi terintegrasi belum dikembangkan.</p>	Nilai: 50%
	<p>Proses Kokreasi: Untuk B18, Mahkamah Agung RI tidak melaporkan apakah pencapaian target dilakukan dengan proses kokreasi.</p>	N/A
<p>Target B24: 1. Adanya uji coba dan evaluasi portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi 2. Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi</p>	<p>Capaian Target: Mahkamah Agung tidak mengumpulkan data dukung untuk target B24. Namun, Mahkamah Agung telah melakukan diskusi dengan BPHN dan IJRS terkait komitmen ini dan akan melanjutkan pelaksanaannya pada RAN OGI VII 2023-2024.</p>	Nilai: 0%
	<p>Proses Kokreasi: BPHN, MA dan IJRS telah melakukan diskusi terkait komitmen ini dan akan melanjutkan pelaksanaan komitmen pada RAN OGI VII 2023-2024.</p>	Aktif



BPHN Kemenkumham		
Target B06: Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara K/L.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none">1. BPHN telah memiliki suatu sistem aplikasi berbasis web dengan nama Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBankum) yang dikelola oleh BPHN dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Pemberi Bantuan Hukum sebagai <i>user</i>.2. MA dan BPHN Kemenkumham telah memiliki MoU terkait portal informasi bersama di tahun 2016.3. Sebagai bentuk tindak lanjut MoU tersebut, BPHN telah mengadakan rapat diskusi peninjauan revitalisasi kerja sama dengan MA di awal tahun 2021.4. Target komitmen untuk perluasan akses dan kapasitas layanan bantuan hukum tercapai melalui adanya proses verifikasi dan akreditasi OBH baru serta reakreditasi terhadap OBH yang sudah ada. Proses akreditasi dan verifikasi OBH baru penting untuk memperluas jangkauan bantuan hukum yang dapat diperoleh masyarakat. Selain itu, penting memastikan terjaganya kualitas pelayanan atas bantuan hukum yang diberikan oleh OBH kepada masyarakat agar berfungsi sebagaimana mestinya melalui proses reakreditasi OBH yang sudah ada. Namun, perlu adanya data yang menunjukkan jumlah OBH yang terdapat di suatu daerah, baik OBH yang dinyatakan lulus akreditasi dan verifikasi sebagai OBH baru maupun reakreditasi OBH yang sudah ada untuk mengetahui kemudahan masyarakat memperoleh	Nilai: 100%



	akses layanan bantuan hukum di setiap daerah.	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan BPHN telah melakukan pertemuan untuk membahas tentang pengembangan portal informasi hukum.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada rapat koordinasi antara BPHN dengan Badimiltun MA yang mendiskusikan rancangan pengembangan portal informasi, dengan fokus mengenai langkah persiapan point-point informasi yang dapat menjadi konsumsi publik berkaitan dengan Bantuan Hukum serta langkah-langkah pengintegrasiannya. 2. Rapat dilakukan atas undangan dari BPHN. 	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN menggunakan hasil Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia pada Tahun 2019 yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) di wilayah provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan sebagai dasar untuk mengembangkan portal informasi bantuan hukum sebagai layanan satu pintu.</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>BPHN telah mengadakan pendalaman mengenai portal yang sudah ada dan mengulas jenis layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014. BPHN juga sudah melakukan koordinasi</p>	Nilai: 50%



<p>terbuka dan terintegrasi</p>	<p>dengan Mahkamah Agung dan OMS untuk mendiskusikan hal-hal yang dapat dimuat dalam portal informasi Bantuan Hukum.</p> <p>Namun, capaian ini hanya mendapat nilai administratif 50 karena belum tercapai kesepakatan antar pihak dan portal informasi terintegrasi belum dikembangkan.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN telah melibatkan YLBHI, PBHI, IJRS, dan LBH APIK dalam diskusi terkait pelaksanaan capaian.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B24</p> <p>1. Adanya uji coba dan evaluasi portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi</p> <p>2. Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>BPHN telah mengirimkan data dukung yang menunjukkan sudah tersedianya portal informasi bantuan hukum (SIDBANKUM). Website ini memuat informasi terkait bantuan hukum mulai dari anggaran bantuan hukum, peraturan terkait bantuan hukum, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum hingga peta sebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Namun, data dukung ini belum menjelaskan terkait uji coba dan evaluasi portal bersama dengan Mahkamah Agung sesuai dengan MoU yang disusun pada 2016.</p>	<p>Nilai: 50%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN, MA dan IJRS telah melakukan diskusi terkait komitmen ini dan akan melanjutkan pelaksanaan komitmen pada RAN OGI VII 2023-2024.</p>	<p>Aktif</p>
<p>OMS Sektor Keadilan</p>		
<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p>		



Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.		
Target B06: 1. Pemetaan kebutuhan data-data yang akan dibuka baik dalam portal informasi BPHN maupun lintas kementerian. 2. Tersedianya kajian dan masukan terkait data kebutuhan dalam portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.	Capaian Target: OMS belum menyusun pemetaan dan kajian terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Koordinasi baru terjadi antara PBHI dengan BPHN, sedangkan dengan MA tidak terjadi.	Pasif
Target B12: Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terbuka.	Capaian Target: IJRS telah melakukan Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia pada Tahun 2019 yang dilakukan di wilayah provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 89,5% responden di Provinsi Lampung dan 92,3% responden di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengetahui adanya Organisasi Bantuan Hukum.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Berdasarkan hasil survei, rekomendasi yang diberikan ialah, perlu adanya portal informasi bantuan hukum sebagai layanan satu pintu yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Portal ini nantinya bertujuan untuk memberikan layanan pencarian informasi ataupun layanan konsultasi terkait bantuan hukum.	Aktif



Target B24: Laporan evaluasi atas portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Capaian Target: <p>OMS Sektor Keadilan telah melakukan pembahasan dengan BPHN dan akademisi terkait evaluasi dari portal informasi bantuan hukum yang telah dikembangkan BPHN. Akan tetapi, belum ada laporan evaluasi atas portal bantuan hukum tersebut akibat belum dapat didorongnya sebuah portal terbuka dan terintegrasi oleh BPHN dan MA secara bersama-sama.</p> <p>OMS telah mendorong evaluasi portal bantuan hukum untuk dapat dimasukkan dalam RAN OGI VII 2023-2024, dan telah melakukan pembahasan bersama BPHN dan MA.</p>	Nilai: 65%
	Proses Kokreasi: <p>BPHN, MA dan IJRS telah melakukan diskusi terkait komitmen ini dan akan melanjutkan pelaksanaan komitmen pada RAN OGI VII 2023-2024.</p>	Aktif

Komitmen 8

Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

Ukuran Keberhasilan 1: Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum.		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: Penjaringan OBH baru yang akan diverifikasi dan diakreditasi (dalam bentuk sosialisasi dan pendataan).	Capaian Target: BPHN telah melakukan identifikasi terkait calon organisasi bantuan hukum di setiap Kantor Wilayah Kemkumham di 33 Provinsi.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS telah membantu BPHN dalam melakukan sosialisasi penjaringan OBH baik dengan mengadakan zoom meeting maupun mengirim pesan Whatsapp.	Aktif
Target B12: 1. Terlaksananya proses verifikasi dan akreditasi OBH baru. 2. Terlaksananya proses reakreditasi OBH yang sudah ada.	Capaian Target: 1. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum baru untuk periode tahun 2022 – 2024 terhadap 121 organisasi di tahun 2021. 2. Proses verifikasi dan akreditasi terdiri dari tahap pendaftaran, perbaikan ketidaklengkapan dokumen verifikasi, pemeriksaan faktual/survei lapangan, rekomendasi pokjada, verasi pusat, sampai rekomendasi kelolosan PBH baru, yang dilakukan oleh Tim 7 bersama Kelompok Kerja Pusat (Pokjapus).	Nilai: 100%



	<p>3. Re-akreditasi juga telah dilakukan terhadap 498 OBH lama dari periode sebelumnya 2019-2021.</p> <p>4. Total OBH baru yang sudah verifikasi dan akreditasi serta OBH lama yang reakreditasi periode 2022-2024 ini adalah 619 OBH.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN sudah melibatkan YLBHI dalam Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi (Tim 7).</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Terselenggaranya evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>BPHN telah melakukan evaluasi terkait proses verifikasi dan akreditasi untuk PBH.</p> <p>Namun, nilai target capaian hanya mencapai 70% karena menurut laporan dari OMS, BPHN tidak melibatkan PBHI atau OMS lainnya dalam proses evaluasi. Data dukung yang dikumpulkan oleh BPHN juga tidak mengandung laporan terkait ko-kreasi antar BPHN dan OMS dalam proses evaluasi.</p>	Nilai: 70%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam laporan yang dikumpulkan dan menurut laporan OMS, BPHN tidak melibatkan PBHI atau OMS lainnya dalam proses evaluasi.</p>	Pasif
<p>Target B24:</p> <p>Adanya rekomendasi sebagai tindak lanjut evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>BPHN telah menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum dalam rangka meningkatkan jumlah dan sebaran pemberi bantuan hukum.</p> <p>BPHN juga terlibat dalam kegiatan OMS untuk periode B24, yakni sebagai narasumber dalam diseminasi hasil penelitian yang disusun sebagai rekomendasi.</p>	Nilai: 100%



	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian survei kebutuhan bantuan hukum yang dilakukan OMS dalam rangka mencapai target periode B24. Namun, BPHN belum melibatkan OMS dalam penyusunan rekomendasi yang dilakukan oleh BPHN.</p>	<p>Semi-aktif</p>
<p>OMS Sektor Keadilan</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Sosialisasi kegiatan outreach/penjaringan OBH di daerah.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS telah berpartisipasi dalam sosialisasi dengan BPHN.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS telah membantu BPHN dalam melakukan sosialisasi dan membagikan pesan <i>whatsapp</i> serta mengadakan zoom <i>meeting</i>.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterlibatan dalam proses verifikasi dan akreditasi OBH baru. Keterlibatan dalam proses reakreditasi OBH yang sudah ada. 	<p>Capaian Target:</p> <p>YLBHI telah terlibat dalam proses verifikasi.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN sudah melibatkan YLBHI dalam anggota Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi (Tim 7).</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>Keterlibatan dalam proses evaluasi proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>PBHI sedang melakukan penelitian terkait sebaran jumlah PBH dan kebutuhan serta kondisi masyarakat miskin. PBHI akan menyerahkan penelitian ini kepada BPHN ketika penelitian sudah selesai.</p>	<p>Nilai: 70%</p>



	<p>Selama periode B18, PBHI tidak dilibatkan oleh BPHN dalam proses evaluasi, sehingga nilai target capaian hanya mencapai 70.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN tidak melibatkan PBHI dalam melakukan proses evaluasi selama periode B18.</p>	Pasif
<p>Target B24:</p> <p>Adanya rekomendasi sebagai tindak lanjut evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS Sektor Keadilan telah menyusun catatan rekomendasi berdasarkan survei kebutuhan bantuan hukum dalam rangka perluasan pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah. OMS telah melibatkan BPHN dalam proses diseminasi catatan rekomenasi yang dibuat oleh OMS Sektor Keadilan dengan menjadikan BPHN sebagai narasumber.</p> <p>Catatan rekomendasi ini tidak menyasar secara spesifik terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum sehingga tidak memperoleh nilai sempurna. Namun, karena catatan rekomendasi ini masih sejalan dengan perluasan akses dan kapasitas layanan bantuan hukum, rekomendasi ini masih mendapatkan penilaian baik.</p>	Nilai: 70%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS Sektor Keadilan telah melakukan ko-kreasi dengan BPHN dalam penyusunan rekomendasi.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 2:</p> <p>Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.</p>		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		



Target B06: 1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal. 2. Tersedianya pedoman kurikulum pelatihan paralegal.	Capaian Target: 1. Telah tersedia Permenkum HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang mengatur tentang ketentuan paralegal, hak dan kewajiban, kompetensi dan pelatihan, pemberdayaan paralegal, hingga pengawasan dan evaluasi paralegal. 2. Telah tersedia Pedoman Kurikulum Pelatihan Paralegal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal dengan menjadi narasumber dalam Rapat Jaringan Bantuan Hukum.	Aktif
Target B12: Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal yang melibatkan OMS	Capaian Target: 1. BPHN telah mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Mendorong Implementasi Kebijakan Pelatihan Paralegal Yang Mengakomodasi Stakeholders Bantuan Hukum”. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 September 2021 via platform zoom, mengundang narasumber yang berkompeten dari akademisi maupun praktisi. 2. Tanggapan peserta terhadap Permekumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal diperlukan untuk menilai efektivitas sosialisasi dan kesesuaian implementasi Permekumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan PBHI dalam pelaksanaan diskusi publik dalam hal pelaksanaan teknis Diskusi Publik.	Akif



Target B18: Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait paralegal yang melibatkan OMS.	Capaian Target: BPHN bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo telah melakukan Penyiapan Bahan Optimalisasi Capaian dan Kualitas Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 yang juga dihadiri oleh Perwakilan dari OBH.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan perwakilan OBH dalam kegiatan implementasi. Selain itu, BPHN juga sudah melibatkan PBHI dalam penyusunan pedoman pelatihan.	Aktif
Target B24: Evaluasi implementasi peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait paralegal yang melibatkan OMS	Capaian Target: BPHN telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 terkait Paralegal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN belum melibatkan OMS dalam melakukan evaluasi implementasi.	Pasif
OMS Sektor Keadilan		
Target B06: Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait paralegal.	Capaian Target: PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal, tapi belum terlibat dalam penyusunan draf pedoman kurikulum pelatihan paralegal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal, tapi belum terlibat dalam	Aktif



	penyusunan draf pedoman kurikulum pelatihan paralegal.	
Target B12: Sosialisasi Peraturan Menteri Kemenkumham terkait Paralegal.	Capaian Target: Sosialisasi telah dilakukan melalui pemaparan materi dalam kegiatan Rapat Jaringan Bantuan Hukum.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan PBHI dalam pelaksanaan diskusi publik dalam hal pelaksanaan teknis.	Aktif
Target B18: Terlaksananya pelatihan paralegal	Capaian Target: PBHI telah dilibatkan oleh BPHN dalam proses implementasi, khususnya dalam penyusunan pedoman pelatihan. Saat ini, PBHI juga sedang dalam proses persiapan penyelenggaraan diklat di 10 wilayah dan sudah melakukan konsultasi bersama BPHN untuk proses penyelenggaraan diklat.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PBHI telah dilibatkan dalam proses implementasi, khususnya dalam penyusunan pedoman pelatihan.	Aktif
Target B24: Evaluasi hasil pelatihan paralegal	Capaian Target: Pada periode B24, OMS Sektor Keadilan mengumpulkan data dukung berupa draf modul pelaksanaan pelatihan paralegal. Namun, OMS Sektor Keadilan mengalami pengunduran dalam pelaksanaan pelatihan paralegal ke tahun 2023, sehingga evaluasi juga belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, OMS Sektor Keadilan mendapatkan penilaian yang bersifat kurang untuk pelaksanaan target ini.	Nilai: 50%



	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS Sektor Keadilan dan BPHN belum melakukan ko-kreasi terkait kegiatan ini.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 3:</p> <p>Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum.</p>		
<p>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</p>		
<p>Target B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Tersedianya Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum. 	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkum HAM No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum sudah disusun, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi. b. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi. 2. Kemenkumham juga telah menyusun pedoman terkait standar layanan bantuan hukum yang berisikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak dan Kewajiban pemberi Bankum; b. Standar Layanan Bankum Litigasi; c. Standar layanan Bankum Non-Litigasi; dan d. Pembinaan: 1). Asistensi; 2) Penilaian; 3) Pengaduan; dan 5) Sanksi. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.</p>	Aktif



Target B12: 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum.	Capaian Target: 1. BPHN telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada PBH via platform Zoom. 2. Sosialisasi juga telah dilakukan terhadap beberapa OBH via zoom, yakni Yayasan Hukum Lasinrang, LBH Surya NTT, dan BKBH FH Universitas Jember. 3. Sosialisasi diberikan agar setiap OBH dapat memperoleh pemahaman yang sama dalam memberikan layanan bantuan hukum, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan layak.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melakukan sosialisasi berama dengan OMS, yaitu Yayasan Hukum Lasinrang, LBH Surya NTT, dan BKBH FH Universitas Jember.	Aktif
Target B18: Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: BPHN telah melakukan sosialisasi terkait Standar Layanan Bantuan Hukum kepada PBH terverifikasi dan memastikan PBH yang terverifikasi melakukan implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. Dengan itu, BPHN telah memenuhi target capaian B18.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah mengadakan diskusi bersama PBHI, IJRS, LBH APIK dan YLBHI terkait implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum.	Aktif
Target B24:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Evaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum	<p>BPHN telah menyusun laporan evaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum. BPHN juga telah menindaklanjuti laporan dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terkait pelanggaran yang dilakukan salah satu PBH, sebagai salah satu bentuk evaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum selama 2022.</p> <p>Selain itu, BPHN telah melakukan rapat evaluasi Standar Layanan Bantuan Hukum bersama OMS Sektor Keadilan dan membahas akselerasi implementasi yang dapat didorong bersama di masa depan.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN telah melakukan ko-kreasi dengan OMS Sektor Keadilan untuk mengevaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum.</p>	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
<p>Target B06:</p> <p>Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait Standar Layanan Bantuan Hukum.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Sosialisasi Standar Layanan Bantuan Hukum.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS tidak mengumpulkan data dukung</p>	Nilai: 0%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS tidak mengumpulkan data dukung</p>	Pasif



Target B18: Adopsi Standar Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: OMS Keadilan telah terlibat dalam diskusi bersama BPHN terkait implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum. Namun, nilai capaian hanya mencapai 50% karena OMS tidak melaporkan proses atau kemajuan implementasi untuk adopsi standar layanan bantuan hukum.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: BPHN telah mengadakan diskusi bersama PBHI, IJRS, LBH APIK dan YLBHI terkait implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum.	Aktif
Target B24: Evaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: OMS Sektor Keadilan telah melakukan rapat evaluasi terkait implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum bersama BPHN. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama, ditemukan bahwa kendala implementasi terletak pada diseminasi informasi, pemahaman PBH, dan asistensi. Sebagai tindak lanjut, akan ada kolaborasi antar OMS dan BPHN dalam mengakselerasi implementasi Starlabankum.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS Sektor Keadilan telah melakukan ko-kreasi dengan BPHN dalam melakukan evaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum.	Aktif

Komitmen 9

Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Korban

<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</p>		
<p>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan berdasarkan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan dan Bantuan Hukum oleh Pusat Analisa dan Evaluasi BPHN. 2. Urgensi Perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam rangka Akses Atas Keadilan. 	<p>Capaian Target:</p> <p>Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melakukan identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan dengan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya kesempatan bagi kelompok rentan memperjuangkan haknya dalam judicial review. b. ketimpangan jumlah PBH. c. bankum yang dinilai belum memberikan keadilan. d. pelaksanaan bankum yang masih menitikberatkan pada litigasi dan lokasi biaya. <p>Analisa tersebut menjadi dasar pentingnya melakukan revisi UU Bankum.</p>	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>
<p>Target B12:</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan kokreasi dengan LBH Apik dalam bentuk <i>Focus Group Discussion</i> dalam penyusunan.</p>	<p>Nilai:</p> <p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p>	<p>Capaian Target:</p>	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>



<p>Evaluasi kebijakan bantuan hukum terkait pemberian bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan hasil evaluasi terhadap UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan temuan akar permasalahan, yakni definisi dari penerima bantuan hukum itu sendiri yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang hanya memberikan cakupan terhadap masyarakat kurang mampu atau miskin secara ekonomi. Padahal, masyarakat yang mampu secara ekonomi pun masih bisa mengalami kerentanan pada aspek lain, misalnya gender. Hal tersebut mengakibatkan perspektif gender dan keberpihakan terhadap kelompok rentan yang tidak hanya sekadar rentan ekonomi menjadi penting untuk menjadi fokus perhatian demi mewujudkan keadilan secara lebih merata.2. Dalam laporannya, Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil merumuskan kualifikasi atas 3 hal, yaitu (1) Setiap orang yang berada dalam Proses Perkara; (2) Masyarakat mampu; dan (3) Masyarakat kurang mampu.	
	<p>Proses Kokreasi</p> <p>LBH APIK telah dilibatkan dalam melakukan evaluasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan. Pelibatan LBH APIK tergambar dalam laporan data dukung dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM</p>	Aktif



Target B18: Penyusunan draft kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Capaian Target: BPHN telah melakukan evaluasi kebijakan Bantuan Hukum untuk pemberian Bantuan Hukum bagi korban, terutama kelompok rentan dan perempuan. Dari hasil tersebut, telah disusun draft kebijakan bantuan hukum bagi korban kelompok rentan dan perempuan berupa kurikulum pendidikan dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: LBH APIK telah dilibatkan dalam proses diskusi dan penyusunan untuk kebijakan.	Aktif
Target B24: Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Capaian Target: BPHN telah menyediakan langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban, terutama kelompok rentan dan perempuan, berupa kurikulum pendidikan yang tertuang dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal. BPHN juga telah melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum untuk kelompok rentan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana bantuan hukum. BPHN juga telah bekerja sama dengan IJRS, PBHI, YLBHI dan LBH APIK untuk membuat kajian terkait kebutuhan kelompok rentan.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan OMS sektor keadilan dalam membuat langkah kebijakan bantuan hukum.	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%



<p>Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</p>	<p>Telah tersedia kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>LBH Apik telah mempresentasikan kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan kepada aparat penegak hukum wilayah DKI Jakarta, Pengadilan tinggi, Polda polres, Kejati/kejadi, Kanwil Kemenkumham DKI dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI, tetapi belum dipresentasikan ke BPHN.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>LBH APIK berpartisipasi dalam penyusunan kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban, terutama kelompok rentan dan perempuan</p>	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses kokreasi terlihat dalam Data Dukung BPHN, yaitu melalui pelibatan dalam perumusan terkait kebijakan bagi kelompok rentan dan perempuan.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>Terlibat dalam pemberian masukan penyusunan langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>LBH APIK telah dilibatkan BPHN dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, LBH APIK dan OMS Keadilan lainnya telah menyerahkan kerangka acuan kerja untuk penyusunan kajian yang dapat menjadi masukan kebijakan kepada BPHN.</p>	<p>Nilai: 100%</p>



rentan dan perempuan.	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>LBH APIK telah dilibatkan BPHN dalam penyusunan langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban, terutama kelompok rentan dan perempuan.</p>	Aktif
<p>Target B24: Terlibat dalam pemberian masukan penyusunan langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS Sektor Keadilan telah terlibat dalam pemberian masukan penyusunan langkah kebijakan dengan memberikan catatan rekomendasi berdasarkan survei kebutuhan hukum bagi kelompok rentan yang telah dilakukan.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS Sektor Keadilan telah dilibatkan oleh BPHN dalam pemberian masukan penyusunan langkah kebijakan.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 2:</p> <p>Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan, dan gender.</p>		
<p>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan, dan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah tersusun kurikulum oleh BPHN dengan memasukan perspektif korban dan sensitifitasnya dalam materi isu-isu kelompok rentan dan gender. Adapun perspektif gender yang dimasukkan dalam kurikulum ini ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Gender, minoritas, dan kelompok rentan; 2. Konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan; dan 3. Isu-isu terkait gender, minoritas, dan kelompok rentan. 	Nilai: 100%

<p>gender yang melibatkan OMS.</p>	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses kokreasi antara BPHN dan OMS Sektor Keadilan telah terjadi dalam penyusunan kurikulum pelatihan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum bersama sejak 2019 hingga 2021, melalui pelibatan dalam perumusan dan pemberian masukan.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Sosialisasi kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi kurikulum kepelatihan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan dengan 3 OMS, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA). b. Asosiasi LBH Apik. c. LBH Papua Justice and Peace. 2. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan tiga hal utama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan. b. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. c. Dapat menggali issue-issue terkait gender, minoritas dan kelompok rentan. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Terlibat dalam melakukan sosialisasi kepada Aparat Penegak hukum.</p>	<p>Aktif</p>



Target B18: Pelatihan Tahap I peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.	Capaian Target: Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dengan BPHN dan OBH terakreditasi di wilayah Kepulauan Riau.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan PBH wilayah Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Tahap I.	Aktif
Target B24: Pelatihan Tahap II peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan dan gender bagi penyelenggara bantuan hukum di daerah.	Capaian Target: BPHN telah melaksanakan serangkaian kegiatan pelatihan Tahap II bagi paralegal di beberapa wilayah untuk dapat memberikan layanan yang berperspektif korban dan sensitif terhadap kelompok rentan dan gender.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan LBH APIK serta PBH dalam melakukan pelatihan.	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Target B06: Terlibatnya OMS dalam penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas	Capaian Target: OMS telah terlibat dalam penyusunan kurikulum dalam bentuk partisipasi perumusan dan pemberian masukan.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Proses kokreasi antara BPHN dan OMS Sektor Keadilan telah terjadi dalam penyusunan kurikulum pelatihan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum	Aktif



kelompok rentan dan gender.	bersama sejak 2019 hingga 2021, melalui pelibatan dalam perumusan dan pemberian masukan.	
Target B12: Penyusunan modul peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	Capaian Target: Proses Kokreasi antara BPHN dengan LBH APIK teridentifikasi dalam Data Dukung BPHN. Bentuk kokreasi yang dilakukan ialah sosialisasi bersama dengan BPHN.	Nilai: 100%
Target B18: Pelatihan Tahap I peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan dan gender bagi pemberi bantuan hukum	Capaian Target: Berdasarkan data dukung yang dikumpulkan, OMS telah melakukan pemberdayaan hukum kepada populasi kunci dengan memberikan pemahaman terkait penyusunan kronologis dan teknik investigasi untuk pemantauan dan pelaporan kasus. Namun, target ini hanya mendapatkan nilai capaian sebesar 50% karena OMS masih belum melakukan pelatihan kepada PBH untuk pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan. Meskipun sebagian dari populasi kunci dapat masuk ke dalam lingkup kelompok rentan, pelaksanaan pemberdayaan hukum ini kurang sesuai dengan target yang telah ditentukan, di mana target penerima pelatihan seharusnya merupakan PBH dengan topik pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi antara BPHN dengan LBH APIK teridentifikasi dalam Data Dukung BPHN. Bentuk kokreasi yang dilakukan ialah sosialisasi bersama dengan BPHN.	Aktif



	Proses Kokreasi: Dalam laporan yang dikumpulkan, OMS tidak memberi keterangan apakah terjadi kokreasi antar OMS dan BPHN dalam melaksanakan target capaian ini.	Pasif
Target B24: 1. Pelatihan Tahap II peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender bagi pemberi bantuan hukum 2. Evaluasi pelatihan	Capaian Target: LBH APIK telah melakukan Pelatihan Tahap II bersama dengan BPHN. Namun, LBH APIK belum mengumpulkan laporan evaluasi pelatihan, sehingga tidak memperoleh nilai capaian target sempurna.	Nilai: 80%
	Proses Kokreasi: LBH APIK telah melakukan pelatihan tahap II dengan ko-kreasi bersama BPHN.	Aktif

Komitmen 10

Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi

<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>		
<p>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Terinventarisir dan teridentifikasinya materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan analisa dan kajian singkat yang hasilnya menunjukkan bahwa kasus sengketa informasi dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam salah satu jenis perkara baik litigasi dan/atau nonlitigasi, dengan catatan kasus tersebut masuk dalam ruang lingkup layanan bantuan hukum, di antaranya : (1) Litigasi (Perdata dan TUN); (2) Nonlitigasi (Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Konsultasi Hukum, Mediasi, Negosiasi, Investigasi Kasus, Pendampingan di Luar Pengadilan, Drafting Dokumen, dan Penelitian Hukum).</p>	<p>Nilai: N/A</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, BPHN belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.</p>	<p>Pasif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN telah melakukan analisa dan kajian singkat mengenai penanganan sengketa informasi. Adapun perjenis sengketa informasi belum terakomodir dalam pilihan jenis perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum</p>	<p>Nilai 100%</p>

	<p>(Sidbankum) yang merupakan aplikasi permohonan bantuan hukum, dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dari hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p> <p>2. BPHN tidak dapat melanjutkan penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya data hasil kajian dari OMS terkait.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, BPHN belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.</p>	Pasif
<p>Target B18: Tersedianya draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan sengketa informasi</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dibuat draft kajian "Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi"</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS telah melakukan pemetaan kebutuhan dan menyerahkan hasil pemetaan kepada BPHN.</p>	Aktif
<p>Target B24: Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>BPHN telah memberikan rekomendasi atas hasil kajian yang telah dilakukan untuk pemberian bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN tidak melibatkan OMS sektor keadilan dalam membuat rekomendasi.</p>	Pasif



Komisi Informasi Pusat		
Ukuran Keberhasilan 1:		
Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).		
Target B06: Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).	Capaian Target: KIP telah menyusun data sengketa informasi yang sudah dimasukkan dalam Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2019 halaman 16 – 21, dengan jumlah permohonan sengketa sebanyak 2928 kasus sepanjang 2010-2019. Sedangkan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 2531 kasus sepanjang 2010-2019.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Belum ada kokreasi antara KL dan OMS. Dalam hal ini, OMS tidak memberikan data terkait bantuan hukum.	
Ukuran Keberhasilan 2:		
Keterlibatan dalam kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		
Target B06: Terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: Komisi Informasi Pusat tidak terlibat dalam penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya hasil kajian dari OMS terkait.	Nilai: N/A
	Proses Kokreasi: OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, KIP belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.	



<p>Target B12: Terlibat dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi telah dilakukan dengan menyediakan data sengketa informasi sebagaimana telah dilaporkan pada target B06 mengenai tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN). 2. KIP tidak dapat melanjutkan penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya data hasil kajian dari OMS terkait. 	<p>Nilai: N/A</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, KIP belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.</p>	
<p>Target B18: Terlibat dalam proses penyusunan draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>KIP telah menyediakan data sengketa informasi yang ditangani KIP untuk penyusunan draft kajian.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS telah memberikan data pemetaan kebutuhan bantuan hukum untuk perkara sengketa informasi kepada K/L terkait.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B24: Terlaksananya hasil rekomendasi kajian</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>KIP telah menyediakan data sengketa informasi pada periode B06. Namun,</p>	<p>N/A</p>



terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	keterlibatannya dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi terbatas dalam penyediaan informasi sengketa tersebut, karena mereka tidak memiliki wewenang untuk memberikan masukan terkait bantuan hukum.	
	Proses Kokreasi: -	N/A
OMS Sektor Keadilan		
Ukuran Keberhasilan 1: Terlaksananya fasilitasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		
Target B06: Terlibat dalam proses inventarisasi dan Identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: OMS belum terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi kajian.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: OMS tidak terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi kajian.	Pasif
Target B12: Terlibat dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: OMS tidak membuat kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Tidak terjadi proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan	Pasif

	perkara sengketa informasi dikarenakan OMS terkait tidak melaksanakan kajian.	
Target B18: Tersedianya draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa	Capaian Target: OMS telah mengumpulkan data dukung yang dibutuhkan dengan mengadakan FGD yang mengundang PBH dan OMS lainnya. Hasil pertemuan FGD tersebut dan hasil riset lainnya diberikan kepada BPHN untuk penyusunan kajian.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS telah melakukan pengumpulan data dan memberikan hasil pengumpulan data dukung kepada BPHN untuk penyusunan kajian.	Aktif
Target B24: Terlaksananya hasil rekomendasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Capaian Target: OMS tidak melakukan hasil rekomendasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: -	Pasif
Ukuran Keberhasilan 2: Terlaksananya pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN.		
Target B06: Pemetaan kebutuhan terkait pelatihan	Capaian Target: OMS belum membuat pemetaan kebutuhan penanganan perkara sengketa informasi.	Nilai: 0%

bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS tidak melaksanakan pemetaan kebutuhan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>	Pasif
<p>Target B12:</p> <p>Perancangan pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS tidak melaporkan data dukung terkait rancangan pelatihan bantuan hukum.</p>	Nilai 0%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS tidak melakukan perancangan pelatihan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>	Pasif
<p>Target B18:</p> <p>Terlaksananya pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS belum dapat melaksanakan pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi, karena tidak memiliki dukungan pendanaan.</p>	Nilai: 0%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS tidak melaksanakan pelatihan, sehingga tidak melibatkan BPHN dan KIP dalam target ini.</p>	Pasif
<p>Target B24:</p> <p>Evaluasi pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS belum melaksanakan pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi, sehingga tidak ada kegiatan yang dapat dievaluasi.</p>	Nilai: 0%



kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN

Proses Kokreasi:

OMS tidak melaksanakan evaluasi, sehingga tidak melibatkan BPHN dan KIP dalam target ini.

Pasif



Komitmen 11
Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan

<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS – NG.</p>		
<p>Kementerian Sosial</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan social.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Pengembangan integrasi DTKS dilakukan dengan pemutakhiran DTKS, yakni melalui pembaruan data agar menghindari data uang terulang, usang, dan tidak tepat sasaran. Pemutakhiran DTKS dapat terlihat pada Keputusan Mensos yang dikeluarkan setiap bulan.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses kokreasi telah terjadi dengan OMS terkait yakni Medialink dalam hal pemberian masukan terhadap integrasi DTKS.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan social.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK DTKS per bulan sejak April 2021 bisa didownload oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. SK DTKS berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data lengkap <i>by name by address</i> yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagai data tunggal dan padan data kependudukan yang telah digunakan dalam penyaluran bantuan sosial yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota, bank penyalur bantuan sosial atau pos penyalur bantuan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya. 	<p>Nilai: 100%</p>



	<p>b. Sebagian data yang telah digunakan dalam penyaluran bantuan sosial di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Komunitas Adat Terpencil termasuk Suku Anak Dalam.</p> <p>c. Data yang sedang dalam proses perbaikan untuk data non-penyaluran bantuan sosial.</p> <p>3. SK DTKS per November 2021 berjumlah 140.688.408 jiwa, naik 1,01% dari jumlah 139.235.327 jiwa di April 2021.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses kokreasi telah terjadi antara Kementerian Sosial dengan Media Link, tetapi hanya berbentuk koordinasi. Sementara proses kokreasi yang substansial belum terjadi.</p>	Aktif
Target B18: Pengembangan Integrasi data terpadu kesejahteraan sosial	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Sosial telah melaksanakan integrasi dengan berbagai data bantuan sosial (data PKH, data sembako, dll.) ke dalam DTKS. Selanjutnya Kementerian Sosial telah mengembangkan aplikasi SAGIS untuk melaksanakan verifikasi lebih lanjut terkait Daftar Penerima Manfaat yang ada dalam DTKS untuk dipastikan kelayakannya terdaftar dalam DTKS.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kokreasi telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan Media Link terkait pengembangan aplikasi DTKS dan SAGIS oleh Kemensos, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kajian oleh Media Link.</p>	Aktif



Target B24: Terlaksananya integrasi semua data terpadu kesejahteraan sosial dalam SIKS NG	Capaian Target: Kementerian Sosial telah melaksanakan integrasi DTKS dengan BPNT, PKH, dan BST. Namun, integrasi DTKS dengan seluruh program kesejahteraan sosial belum dilakukan karena perlu pembenahan untuk kualitas data. Untuk penanganan aduan juga telah dilakukan integrasi dalam Command Center 171. Kementerian sosial melaporkan perkembangan cekbansos.kemsos.go.id dan WBS, selain itu telah terdapat siklus perbaikan DTKS Baru dan aplikasi SAGIS yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi data Penerima Manfaat.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses ko-kreasi belum terlihat pada pelaporan B24	Semi-Aktif
Media Link		
Target B06: Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS – NG.	Capaian Target: Media Link telah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Media Link sudah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG sebagai OMS mitra, dengan rekomendasi: a. Melihat perkembangan saat ini, maka proses pepadanan yang belum dilakukan sampai 100% harus segera dituntaskan. Integrasi dengan seluruh program akan menjadi kemajuan penting pada perwujudan akuntabilitas seluruh program-program kesejahteraan sosial pemerintah.	Aktif



	<p>b. Kemensos perlu mengembangkan mekanisme verifikasi dan validasi yang inklusif bagi PPKS (Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial) dengan cara mengembangkan mekanisme khusus (terpisah dari mekanisme regular) untuk merespon kebutuhan kelompok rentan dan termarginalkan dengan mengoptimalkan peran CSO melalui swakelola Tipe 3 maupun mengoptimalkan aplikasi Cek Bansos untuk mekanisme verifikasi dan validasi online.</p>	
<p>Target B12: Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS – NG.</p>	<p>Capaian Target: Media Link telah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi: Media Link sudah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG sebagai OMS mitra, dengan rekomendasi:</p> <p>a. Melihat perkembangan saat ini, maka proses pepadanan yang belum dilakukan sampai 100% harus segera dituntaskan. Integrasi dengan seluruh program akan menjadi kemajuan penting pada perwujudan akuntabilitas seluruh program-program kesejahteraan sosial pemerintah.</p> <p>b. Kemensos perlu mengembangkan mekanisme verifikasi dan validasi yang inklusif bagi PPKS (Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial) dengan cara mengembangkan mekanisme khusus (terpisah dari mekanisme regular) untuk merespon kebutuhan kelompok rentan dan termarginalkan dengan mengoptimalkan peran CSO melalui swakelola Tipe 3 maupun mengoptimalkan aplikasi Cek Bansos untuk mekanisme verifikasi dan validasi online.</p>	<p>Aktif</p>

Target B18: Tersedianya Kajian dan Masukan terkait Pengembangan SIKS-NG	Capaian Target: Media Link telah menyusun kajian serta rekomendasi kepada Kementerian Sosial terkait pengembangan aplikasi SIKS-NG. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa, SIKS-NG telah dikembangkan selaras dengan prinsip Keterbukaan Pemerintah dan masukan dari Media Link telah diakomodir oleh Kemensos.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi telah dilaksanakan dengan baik melalui pemberian rekomendasi dan rapat koordinasi Media Link dengan Kemensos	Aktif
Target B24: Diseminasi terkait adanya integrasi semua data terpadu kesejahteraan sosial dalam SIKS NG	Capaian Target: Integrasi semua DTKS dalam SIKS NG belum bisa dilakukan dengan sempurna karena masih perlu pembenahan terhadap kualitas data existing. Akan tetapi, MediaLink telah melakukan diseminasi terkait platform satu data DTKS sebagai bentuk diseminasi untuk memberikan pemahaman publik terhadap integrasi DTKS dan mendapatkan partisipasi aktif publik dalam mewujudkan DTKS yang berkualitas	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Semi-Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap feedback masyarakat.		
Kementerian Sosial		



Target B06: Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.	Capaian Target: Kemensos telah mengembangkan data penerima program kesejahteraan sosial untuk diakses oleh Penerima Manfaat melalui laman: https://cekbansos.kemensos.go.id . Nantinya Penerima Manfaat dapat mengecek apakah mereka menerima bantuan sosial seperti PKH, BST, dan BNPT.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kemensos belum melibatkan unsur non-pemerintah dalam proses ini.	Pasif
Target B12: Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan inklusifitas dan akuntabilitas dari masyarakat serta meningkatkan keterbukaan atau transparansi penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, Kementerian Sosial mengembangkan fitur usul sanggah pada aplikasi cek bansos dalam bentuk mobile. 2. Aplikasi ini bisa di download di playstore dengan nama Aplikasi Cek Bansos. Usul Sanggah merupakan salah satu menu yang tersedia pada aplikasi cek bansos yang bisa diakses dengan menggunakan user id yang telah diverifikasi dan diaktivasi oleh admin Kementerian Sosial. 	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Belum terjadi Proses Kokreasi antara Kementerian Sosial dengan OMS.	Pasif
Target B18: Pengembangan data penerima program kesejahteraan	Capaian Target: Kementerian Sosial telah mengembangkan aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memberikan usulan maupun tanggapan terkait dengan kelayakan	Nilai: 100%

sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik	penerimaan bantuan sosial. Aplikasi tersebut dapat di download bagi pengguna android.	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kokreasi telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan Media Link terkait pengembangan aplikasi DTKS dan SAGIS oleh Kemensos, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kajian oleh Media Link.</p>	Aktif
<p>Target B24: Tersedianya seluruh data terkait penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap feedback masyarakat</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. layanan transparansi bantuan sosial melalui www.cekbansos.kemensos.go.id dan layanan pengaduan terkait Bansos melalui aplikasi Usul-Sanggah 2. Aplikasi Usul-Sanggah telah membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan usulan dan sanggahan kepada Kementerian Sosial terhadap penerima serta perseorangan yang layak untuk menerima bantuan sosial. Melalui aplikasi Usul-Sanggah sudah terdapat 1.571.520 usulan diterima, dan 4.203 Sanggahan yang disetujui. Hal ini bermanfaat untuk memastikan akuntabilitas pemberian Bantuan Sosial. 	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Proses kokreasi telah terjadi antara Kementerian Sosial dengan Media Link, tetapi hanya berbentuk koordinasi. Sementara proses kokreasi yang substansial belum terjadi.</p>	Semi-Aktif
Media Link		
<p>Target B06:</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Media Link belum melakukan sosialisasi.</p>	Nilai: 0%

<p>Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan.</p>	<p>Proses Kokreasi: Media Link belum melakukan sosialisasi.</p>	<p>Pasif</p>
<p>Target B12: Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan.</p>	<p>Capaian Target: Media Link telah melaksanakan sosialisasi dengan materi “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi melalui Brebes Data Tunggal.”</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi: Sosialisasi dilakukan pada 17 Kepala Desa dari 17 Kecamatan dan 5 Kelurahan di Kabupaten Brebes dengan materi : ‘Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi melalui Brebes Data Tunggal’ Pada sosialisasi ini, Media Link mengajak Kepala Desa agar masyarakat melakukan pemeriksaan data Bantuan Sosial masing-masing.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18: Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data</p>	<p>Capaian Administratif: Media Link belum melaksanakan sosialisasi terkait dengan DTKS. Sosialisasi baru akan dilaksanakan pertengahan Juli 2022</p>	<p>Nilai: 0%</p>

<p>penerima program kesejahteraan</p>	<p>Proses Kokreasi: Belum melaksanakan kokreasi</p>	
<p>Target B24: Diseminasi terkait adanya platform data penerima program kesejahteraan</p>	<p>Capaian Target: Diseminasi terkait platform data penerima program kesejahteraan telah dilakukan MediaLink pada 13 Januari 2023. Kegiatan diawali dengan presentasi materi tentang integrasi data kesejahteraan, platform satu data kesejahteraan dan peran masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas satu data DTKS.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi: MediaLink telah mencoba untuk mengikutsertakan Kemensos dalam kegiatan diseminasi, namun tidak ada respon sehingga ko-kreasi tidak dapat terlaksana.</p>	<p>Semi-Aktif</p>

Komitmen 12

Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa

<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan</p>		
<p>Kementerian Desa PDTT</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para pemangku kepentingan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa telah dilakukan kepada para OMS agar OMS dapat mempelajari kebijakan ini.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah melibatkan Seknas FITRA dalam melakukan Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa. 2. Kemendesa PDTT juga telah berkoordinasi dengan WVI untuk membagikan konsep Akuntabilitas Sosial. 	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>1. Tersusunnya rencana pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD) perihal Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersusun rencana pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD) perihal Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa. 2. Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa menggarisbawahi strategi penerapan akuntabilitas sosial di desa yang meliputi: 	<p>Nilai: 100%</p>



<p>2. Terlaksananya pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk KPMD) perihal akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Penguatan partisipasi warga desa, dengan melakukan kaderisasi desa, pengembangan kapasitas literasi, pengembangan kapasitas warga desa;b. Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, dengan cara mendorong keterbukaan informasi, penguatan musyawarah desa, penguatan kepemimpinan desa, serta penyusunan produk hukum yang partisipatif; danc. Penguatan tata kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial, dengan cara pendataan Sistem Informasi Desa (SID), visi kolektif warga desa, dan perencanaan pembangunan dan anggaran desa untuk SDGs Desa. <p>4. Masyarakat desa (termasuk KPMD) telah mempelajari akuntabilitas sosial ketika menghadiri sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Kementerian Desa bersama dengan Seknas FITRA telah menyusun Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa sebagai panduan dalam memberikan pembelajaran terkait akuntabilitas sosial di desa.2. Dalam proses penyusunan dan sosialisasi, Kementerian Desa telah aktif melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan OMS mitra OGI seperti WVI dan TII.3. Dengan pelibatan aktif ini, diharapkan daerah binaan OMS akan mendapatkan pembelajaran terkait akuntabilitas sosial berdasarkan panduan yang sama.	<p>Aktif</p>



<p>Target B18: Terimplementasikannya model akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa di lokasi percontohan</p>	<p>Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melaksanakan implementasi model akuntabilitas di dua Desa dan telah melaksanakan kokreasi dengan Wahana Visi Indonesia selaku mitra OMS dalam komitmen ini. Model akuntabilitas yang dikembangkan adalah mekanisme <i>scorecard</i> untuk memberikan penilaian terhadap program yang dijalankan. Kedepannya, perlu dilaksanakan implementasi model akuntabilitas di desa lainnya sesuai dengan target capaian. WVI dan OMS lainnya perlu dilibatkan dalam pelaksanaan model akuntabilitas sosial</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi: Proses Kokreasi telah dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT dengan WVI dalam bentuk kunjungan ke Kupang, selaku desa pelaksanaan akuntabilitas desa WVI. Dalam kunjungan juga akan menyusun Buku Saku terkait Kartu Penilaian Layanan Perlindungan Anak dalam Musyawarah Desa.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B24: 1. Tereplikasinya model desa percontohan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa ke 200 desa non-lokasi percontohan. 2. Evaluasi output terkait implementasi Akuntabilitas Sosial di Desa.</p>	<p>Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melakukan replikasi akuntabilitas sosial ke 320 Desa melalui kegiatan diseminasi uji coba <i>scorecard</i> pada Bulan Oktober 2022 dan workshop akselerasi sinergitas antar stakeholder pada Desember 2022. Model akuntabilitas yang dikembangkan adalah mekanisme <i>scorecard</i> untuk memberikan penilaian terhadap program yang dijalankan. Sebagai evaluasi terkait implementasi akunsos di desa, dibutuhkan fasilitator yang</p>	<p>Nilai: 100%</p>



	paham atas isu layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah desa maupun teknik fasilitasi pengisian borang LEPAS	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Proses Ko-kreasi telah dilakukan antara Kementerian Desa PDTT dengan OMS dimana dalam kegiatan diseminasi hasil perluasan uji coba score card akuntabilitas sosial terdapat diikuti dari Perwakilan Wahana Visi Indonesia.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 2:</p> <p>Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memahami konsep implementasi akuntabilitas sosial.</p>		
<p>Kementerian Dalam Negeri</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Terlaksananya pertemuan multi-pihak antara Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil terkait implementasi akuntabilitas social.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Pertemuan multi-pihak belum terselenggara dikarenakan akibat refocusing anggaran, sehingga target ini tidak dapat tercapai.</p>	<p>Nilai: 0%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS juga tidak dapat mengikuti pertemuan multipihak karena pertemuan tidak terlaksana.</p>	Pasif



Target B12: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan paparan terkait program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang merupakan payung program pelaksanaan akuntabilitas sosial di desa di agenda sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT.2. Paparan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dan OMS yang hadir dalam Agenda Penguatan P3PD, yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS telah hadir untuk mempelajari akuntabilitas sosial dalam agenda sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT.	Aktif
Target B18: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD	Capaian Target: Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD terkait pemahaman konsep implementasi akuntabilitas sosial telah dilaksanakan melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Namun, terkait dengan pelatihan kepada BPD belum	Nilai: 75%
	Proses Kokreasi: Kementerian Dalam Negeri belum melaksanakan Kokreasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pelatihan Akuntabilitas Sosial pada Aparat Desa dan BPD	Pasif



<p>Target B24: Tersedianya hasil evaluasi berupa keberhasilan capaian bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD.</p>	<p>Capaian Target: Kemendagri telah melaksanakan Pelatihan Aparatur Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan berjalan secara dinamis dan feedback dari peserta diberikan secara aktif. Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bagi aparatur dan calon pelatih, perlunya peningkatan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi tugas pembina teknis pemerintahan desa, perlunya peningkatan alokasi anggaran, perlunya digitalisasi bahan ajar, dan perlunya dukungan regulasi sebagai payung hukum kebijakan bagi landasan implementasi tugas PTPD.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi: Kemendagri belum melaksanakan ko-kreasi dalam Pelatihan Aparatur Desa dan PTPD</p>	<p>Pasif</p>
<p>OMS</p>		
<p>Ukuran Keberhasilan 1: Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa.</p>		
<p>Target B06: 1. Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para masyarakat dan</p>	<p>Capaian Target: OMS telah berpartisipasi dalam sosialisasi serta pertemuan multipihak yang ada.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p>	<p>Aktif</p>



<p>pemerintahan desa.</p> <p>2. Terlaksananya pertemuan multi-pihak antara Kementerian/Lem baga dan OMS terkait implementasi akuntabilitas social.</p>	<p>OMS (Fitra, TII dan WVI) telah melakukan sosialisasi kebijakan akuntabilitas dan berkoordinasi dengan Kemendesa PDTT.</p>	
<p>Target B12:</p> <p>1. Tersusunnya panduan operasional terkait Akuntabilitas Sosial bagi masyarakat desa dan pemerintahan desa untuk meningkatkan pelayanan di desa.</p> <p>2. Asistensi pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk KPMD) dan pemerintahan desa perihal akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>WVI merupakan OMS yang aktif terlibat dan hadir dalam bimtek yang diadakan oleh Kementerian Desa PDTT. Kerangka operasional yang telah dikumpulkan adalah manifestasi dari hasil pembelajaran dari Kementerian Desa dan pengalaman WVI di desa dampingan.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>WVI merupakan OMS yang aktif terlibat dan hadir dalam bimtek yang diadakan oleh Kementerian Desa PDTT. Kerangka operasional yang telah dikumpulkan adalah manifestasi dari hasil pembelajaran dari Kementerian Desa dan pengalaman WVI di desa dampingan.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>Asistensi implementasi model akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa di</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>WVI telah melaksanakan implementasi model akuntabilitas sosial di beberapa lokasi, termasuk asistensi Kementerian Desa PDTT di wilayah Kupang. Kedepannya perlu</p>	<p>Nilai: 100%</p>



lokasi percontohan	berkoordinasi dengan Kemendesa agar dapat terus terlibat dalam pelaksanaan implementasi model akuntabilitas sosial di Desa percontohan lainnya yang saat ini dalam tahap pengadaan.	
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi antara OMS dengan Kemendesa PDTT dengan pelaksanaan kunjungan dari Kemendesa PDTT menuju desa dampingan WVI.	Aktif
Target B24: 1. Asistensi terkait replikasi model desa percontohan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa ke 200 desa non-lokasi percontohan. 2. Tersedianya hasil evaluasi berupa keberhasilan capaian cakupan pelayanan yang dilakukan oleh para kader.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none">1. WVI telah melakukan replikasi akuntabilitas sosial suara dan aksi warga/citizen voice action di Kabupaten Kupang, Sumba Timur, dan Timor Tengah Selatan. Prosesnya dilakukan dengan pemantauan standar dan tatap muka, diskusi publik, dan implementasi kartu penilaian (score card).2. Fokus utama pelaksanaan suara aksi warga adalah memperbaiki tata kelola pelayanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari pelaksanaannya didapatkan capaian bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa menjadi lebih baik, adanya perizinan yang lebih baik, dan adanya aturan serta standar pelayanan yang lebih baik.3. Evaluasi yang dapat disampaikan dari pelayanan yang dilakukan BUMDes yang masih memiliki kategori kurang antara lain kategori administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dampak BUMDes, usaha yang dilakukan BUMDes, kelembagaan, dukungan pemerintah, modal dan aset, serta aturan dan legalitas BUMDes.	Nilai: 100%



	4. Diharapkan setelahnya desa percontohan antara K/L dan WVI dapat disamakan sehingga ada desa contoh bersama.	
	Proses Ko-kreasi: WVI melibatkan Kemendesa PDTT dalam proses pelaksanaan akunsos sejak diskusi awal utamanya dengan tenaga ahli Kemendesa PDTT.	Aktif

Komitmen 13

Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

Ukuran Keberhasilan 1:		
Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data) dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).		
KPU		
Target B06: Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Capaian Target: KPU tidak mengumpulkan data dukung hingga akhir masa verifikasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Koordinasi antara KPU dan Perludem masih terhambat karena belum ada PoC KPU untuk RAN OGI.	Pasif
Target B12: Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Capaian Target: 1. Telah terdapat sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format Open Data KPU. 2. KPU telah melaksanakan Launching Open Data di Ruang rapat Kantor KPU RI pada tanggal 29 September 2021. 2. KPU sudah mulai responsif dalam komunikasi terkait progres. Sekretariat OGI mengupayakan grup bersama KPU dengan Perludem.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: KPU telah menerima audiensi dari Perludem mengenai peningkatan <i>platform</i> Open Data KPU.	Aktif



Target B18: Integrasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu dan tersedianya data pemilu dalam format data terbuka (open data)	Capaian Target: KPU telah melaksanakan integrasi informasi penyelenggaraan Pemilu ke dalam portal www.opendata.kpu.go.id . Dalam portal telah tersedia 9 Topik yang terdiri atas 144 Dataset serta 332 Filedata yang dapat diakses oleh publik dan telah disajikan dalam format <i>Open Data</i> .	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam rapat koordinasi telah diinformasikan oleh Perludem terkait hasil kajiannya serta informasi data yang perlu disajikan dalam portal Open Data KPU.	Aktif
Target B24: Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data)	Capaian Target: Dalam rapat koordinasi telah diinformasikan oleh Perludem terkait hasil kajiannya serta informasi data yang perlu disajikan dalam portal Open Data KPU. KPU telah menyediakan sistem penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dalam portal www.opendata.kpu.go.id yang menyediakan 9 Topik dengan 155 dataset yang dapat diakses oleh publik. Ko-kreasi dilaksanakan lewat rapat koordinasi dan penyelenggaraan FGD dengan Perludem yang menginformasikan hal-hal apa saja terkait prinsip open data yang perlu dikembangkan lagi dalam portal www.opendata.kpu.go.id .	Nilai: 100%



	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi telah dilaksanakan antara KPU dan Perludem, komitmen mengenai pemilu oleh KPU dan ko-kreasinya dengan Perludem akan dilanjutkan dalam RAN OGI VII 2023-2024.</p>	Aktif
KPU		
<p>Target B06:</p> <p>Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>KPU tidak mengumpulkan data dukung hingga akhir masa verifikasi.</p>	Nilai: 0%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Koordinasi antara KPU dan Perludem masih terhambat karena belum ada PoC KPU untuk RAN OGI.</p>	Pasif
<p>Target B12:</p> <p>Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>KPU telah melaksanakan uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di TPS dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di TPS oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 2. Melakukan sosialisasi kepada petugas KPPS serta jajaran satker KPU daerah dan masyarakat terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). 3. Mengukur berbagai macam bentuk penulisan dari beberapa petugas KPPS dalam formulir Plano agar dapat disesuaikan dan diukur hasil akurasi pembacaan sistem terhadap tulisan Uji 	Nilai: 100%



	<p>coba Aplikasi Sirekap dilakukan di beberapa daerah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantor KPU. Kota Depok. Bandung. Kota Magelang. Seluruh wilayah yg menyelenggarakan Pilkada 2020 (menjelang hari H, sesuai surat No 669). <p>KPU sudah responsif dalam komunikasi terkait progres, walaupun masih ada silo dalam departemen. Sekretariat OGI mengupayakan grup bersama KPU dengan Perludem. Namun, yang melakukan pelaporan dari KPU adalah biro lainnya.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>KPU telah menerima audiensi dari Perludem mengenai peningkatan rekapitulasi elektronik.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18: Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>KPU telah melaksanakan uji coba terkait Sistem Rekapitulasi (SIREKAP) pada 30 Maret 2022. Namun, uji coba tersebut belum sampai dengan bagaimana menyajikan/menampilkan hasil rekapitulasi dalam bentuk data yang terbuka.</p>	<p>Nilai: 75%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Rapat Koordinasi untuk pembahasan target capaian telah difasilitasi oleh Sekretariat OGI. Namun, tindak lanjut dari rapat belum dilaksanakan, yaitu dengan melibatkan Perludem dalam proses uji coba dalam SIREKAP sampai dengan bentuk penyajiannya.</p>	<p>Semi-Aktif</p>



Target B24: 1. Penyusunan laporan evaluasi uji coba berulang rekapitulasi elektronik 2. Diseminasi hasil uji coba berulang rekapitulasi elektronik.	Capaian Target: Tidak ada pengumpulan Data Dukung.	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada pengumpulan Data Dukung, dari hasil rapat koordinasi belum terdapat uji coba SIREKAP yang melibatkan OMS. Meskipun demikian, secara umum KPU dan Perludem telah melakukan ko-kreasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan keterbukaan data pemilu.	Semi-Aktif
PERLUDEM		
Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi informasi penyelenggaraan pemilu dalam format data terbuka.		
Target B06: Tersedianya kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia.	Capaian Target: Perludem telah membuat kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia dan sudah disampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu DPR RI.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: 1. Hasil kajian belum disampaikan ke KPU. 2. Highlight Kajian: Unsur ekosistem <i>civic tech</i> yang berhasil dengan rating hijau diantaranya kepemimpinan dan komitmen politik, keterlibatan dan kapabilitas warga, dan dukungan anggaran.	Aktif
Target B12: Tersedianya kajian tentang ketersediaan data pemilu dan	Capaian Target: Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekosistem <i>civic tech</i> dan data pemilu terbuka di Indonesia cukup baik	Nilai: 100%



rekomendasi strategi digitalisasi menjadi format data terbuka.	dengan masyarakat sipil dan teknologi pemilu warga yang ada dan komitmen penyelenggara pemilu untuk menyediakan data pemilu terbuka.	
	Proses Kokreasi: 1. Komunikasi KPU dan Perludem belum optimal sehingga pelaksanaan Capaian Target dilakukan masing-masing tanpa adanya koordinasi. Contact person dari KPU bukan dari divisi yang secara langsung mengimplementasi renaksi. Sehingga dalam proses pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi, koordinasi antar lembaga (sekretariat OGI, KPU, dan Perludem) belum optimal.	Semi Aktif
Target B24: Tersedianya kajian rekomendasi terhadap portal pusat publikasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu	Capaian Target: Perludem telah membuat kajian rekomendasi terhadap portal sistem informasi penyelenggaraan pemilu. Kajian rekomendasi tersebut disandarkan pada pemenuhan prinsip data terbuka dengan mengevaluasi portal opendata.kpu.go.id . Rekomendasi yang diberikan Perludem dalam kajian tersebut meliputi publikasi data pemilu yang belum tersedia secara online, penerapan prinsip data terbuka untuk data yang sudah tersedia secara online, dan mengintegrasikan basis data pemilu.	100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan Perludem dalam bentuk rapat koordinasi dengan KPU dan komitmen ini akan dilanjutkan oleh KPU dan Perludem di dalam RAN OGI VII 2023-2024.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2:		



<p>Terselenggarakannya kajian akademik terkait uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel.</p>		
Target B06: <p>Tersedianya rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu.</p>	Capaian Target: <p>Perludem telah menyusun rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu.</p>	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none">1. Catatan telah disampaikan ke Baleg DPR RI dan Panja RUU Pemilu DPR RI namun belum disampaikan ke KPU.2. Highlight Kajian: Unsur ekosistem <i>civic tech</i> yang berhasil dengan rating hijau diantaranya kepemimpinan dan komitmen politik, keterlibatan dan kapabilitas warga, dan dukungan anggaran.	Aktif
Target B12: <p>Tersedianya kajian tentang kesiapan pengelolaan data hasil pemilu melalui sistem rekapitulasi elektronik.</p>	Capaian Target: <p>Telah tersedia kajian tentang kesiapan pengelolaan data hasil pemilu melalui sistem rekapitulasi elektronik.</p>	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none">1. Secara umum, sebagian besar data kunci pemilu sudah terbuka dan tersedia secara online. Namun, data-data tersebut belum bisa secara penuh disebut sebagai open data. Dalam kajiannya, Perludem menuliskan prinsip-prinsip open data.2. Komunikasi KPU dan Perludem belum optimal sehingga pelaksanaan Capaian Target dilakukan masing-masing tanpa adanya koordinasi. <i>Contact person</i> dari KPU bukan dari divisi yang secara langsung mengimplementasi renaksi. Sehingga dalam proses pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi,	Semi Aktif



	koordinasi antarlembaga (sekretariat OGI, KPU, dan Perludem) belum optimal.	
Target B18: Terselenggarakannya pemantauan uji coba rekapitulasi elektronik di beberapa daerah	Capaian Target: Koordinasi dalam rangka pencapaian target telah dilakukan antara Perludem - KPU dengan difasilitasi Sekretariat OGI. Namun, tindak lanjut dari pertemuan tersebut belum dilakukan oleh KPU maupun Perludem.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi baru dilaksanakan sebatas rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Sekretariat OGI. Namun, tindak lanjut dalam rangka pencapaian target belum dilaksanakan.	Semi Aktif
Target B24: 1. Tersedianya kajian rekomendasi terhadap pengelolaan data hasil pemilu yang diujicoba oleh KPU 2. Diseminasi hasil kajian evaluasi uji coba e-rekap	Capaian Target: Tidak dapat dilaksanakan karena bergantung pada pelaksana lainnya	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada pengumpulan Data Dukung, namun secara umum Perludem dengan KPU telah melakukan ko-kreasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan keterbukaan data pemilu	Semi-Aktif

Komitmen 14

Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data

Ukuran Keberhasilan 1:		
Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data yang dapat diakses oleh publik.		
Kementerian Kesehatan		
Target B06: 1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.	Capaian Target: 1. Kemenkes telah melakukan uji coba sistem M-Health di 25 Puskesmas wilayah Jabodetabek. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan juga telah terlaksana. Perbaruan data tersebut dapat dilihat dalam surat Kepmenkes No. 4720 Tahun 2021 terkait Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terintegrasi.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam melakukan uji coba ini, Kemenkes belum melibatkan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).	Pasif
Target B12: 1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.	Capaian Target: 1. Sosialisasi dan implementasi aplikasi MHealth: Pendampingan Piloting Implementasi Aplikasi MHealth untuk seluruh puskesmas di 10 Kabupaten/Kota terpilih: Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kota Malang. 2. Kegiatan sosialisasi berisi:	Nilai: 100%



	<ul style="list-style-type: none">a. Paparan kondisi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS - PK) Kabupaten/Kota.b. Paparan fitur baru aplikasi Keluarga Sehat dan aplikasi MHealth.c. Pendampingan penggunaan aplikasi MHealth Nakes, Beneficer, dan Intervensi Manajer. <p>3. Highlight materi sosialisasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Aplikasi PIS - PK dan Kekurangan PIS - PK:<ul style="list-style-type: none">· Tenaga Kesehatan: tidak bisa memantau kondisi keluarga yang telah disurvei· Masyarakat: tidak dapat mengetahui status keluarganya dan belum bisa mendapatkan informasi Kesehatan dari faskes terdekatb. MHealth:<ul style="list-style-type: none">· MHealth merupakan sebuah layanan yang melakukan integrasi data individu dan keluarga dengan menggunakan PIS – PK sebagai basis data informasi (Satu Data Kesehatan)· MHealth bertujuan meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dan nakes dalam peningkatan kualitas Kesehatan Indonesia· Menjadi salah satu fasilitas untuk melakukan koordinasi antara masyarakat dan nakes khususnya dalam implementasi program kesehatan· Tersedia MHealth bagi Nakes, Beneficer, dan Intervensi Manajer. <p>4. Pengembangan MHealth:</p>	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sistem aplikasi mHealth Nakes (web dan mobile). b. Pengembangan mobile Health Beneficier. c. Pengembangan integrasi data dengan aplikasi keluarga sehat (PIS - PK). d. Pengembangan integrasi dengan aplikasi -aplikasi lain terkait Kesehatan. <p>5. Hasil pemetaan dan perbaruan data fasilitas Kesehatan:</p> <p>Data pendukung terkait target pemetaan dan perbaruan data faskes dapat diunduh melalui Link https://link.kemkes.go.id/KMKDATAPUSKESMASDES20</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Telah terjadi dua kali rapat koordinasi antara Kemenkes dan INFID yang diinisiasi oleh INFID dan Sekretariat Nasional OGI.</p>	Aktif
<p>Target B18: Terintegrasinya data terkait Pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi ke dalam aplikasi yang dapat diakses oleh publik</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Kesehatan, melalui Digital Transformation Officer (DTO) akan melaksanakan integrasi seluruh aplikasi Kementerian Kesehatan, seperti NAR, KOMDAT KAI, EPPGBM, SIRS, Health Quarantine, SILACAK, SITB,SIHA, dll. Integrasi akan dilakukan ke dalam Indonesia Health Services (IHS) yang akan dilaunching pada bulan Juli.</p>	Nilai: 70%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses Kokreasi dengan INFID belum tergambar dalam laporan. Belum terdapat kegiatan lainnya yang juga melibatkan INFID atau unsur masyarakat lainnya.</p>	Pasif



<p>Target B24: Tersedianya data terkait informasi pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dalam program intervensi untuk mempercepat penurunan stunting yang dapat diakses oleh publik.</p>	<p>Capaian Target: Kemenkes telah mengembangkan Satu Sehat sebagai platform interoperabilitas dan kolaborasi sistem dan data kesehatan yang salah satunya menyediakan informasi mengenai pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Data layanan kesehatan seksual dan reproduksi dapat dimanfaatkan melalui Dashboard Satu Data Kesehatan dalam platform Satu Sehat. Dashboard intervensi spesifik stunting juga dikembangkan Kemenkes (termasuk yang terkait dengan kesehatan reproduksi) yang dapat membantu pemngambil keputusan dalam pemantauan progres pencapaian target penurunan stunting.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan Kemenkes bekerja sama dengan INFID dalam bentuk survei pengumpulan persepsi umum dalam pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi berbasis data dan M-KIA.</p>	<p>Aktif</p>
<p>INFID</p>		
<p>Ukuran Keberhasilan 1: Sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik.</p>		
<p>Target B06: Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya</p>	<p>Capaian Target: INFID belum melakukan sosialisasi MHealth karena MHealth masih dalam tahap pengembangan.</p>	<p>Nilai: N/A</p>
	<p>Proses Kokreasi: INFID telah memberikan masukan tambahan terkait pengembangan sistem MHealth</p>	



<p>bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.</p>	<p>misalnya dengan menambah fitur untuk melayani kebutuhan seksual dan reproduksi. Masukan ini dapat digunakan Kemenkes untuk mengembangkan aplikasi MHealth ke depannya.</p>	
<p>Target B12: Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.</p>	<p>Capaian Target: INFID belum melakukan sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas Kesehatan dikarenakan MHealth masih dalam proses pengembangan.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi: INFID telah berkoordinasi dengan Kemenkes dan Seknas OGI terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi untuk memetakan inisiatif dan mendorong pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang mudah diakses oleh publik, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. 2. Saat ini, MHealth masih dalam tahap pengembangan sehingga beberapa diskusi menghasilkan beberapa tindak lanjut diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Para pihak sepakat untuk mengembangkan fitur demand side dalam MHealth dan apabila diperlukan melakukan diskusi terfokus agar lebih responsif kebutuhan kelompok rentan. b. Memastikan dan mengintegrasikan aplikasi yang akan didorong karena ada beberapa fitur mengenai kesehatan ibu dan anak di aplikasi yang berbeda yaitu peduli lindungi, telemedicine, MHealth, dan MKia. 3. Strategi percepatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rapat koordinasi pada Bulan Januari 2022 untuk mengetahui perkembangan sistem MHealth dan potensi integrasi aplikasi mengenai kesehatan ibu 	<p>Aktif</p>

	<p>dan anak yang sudah dikembangkan.</p> <p>b. Melakukan Webinar/Podcast/konten sosial media ataupun webinar mengenai MHealth/aplikasi terkait dan relevansinya dalam mendorong kesehatan seksual dan reproduksi yang lebih baik di masa pandemik.</p>	
<p>Target B18: Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitasi kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan</p>	<p>Capaian Target: INFID telah mengirimkan <i>Terms of Reference</i> (TOR) terkait dengan kegiatan sosialisasi, serta mengajukan permohonan narasumber dari Kementerian Kesehatan. Namun, Kementerian Kesehatan belum menanggapi terkait dengan permohonan hal tersebut.</p>	<p>Nilai: 70%</p>
	<p>Proses Kokreasi: Proses Kokreasi telah diinisiasi oleh INFID, tetapi tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan terkait dengan peluang Kokreasi tersebut belum terlaksana.</p>	<p>Semi Aktif</p>
<p>Target B24: Terlaksananya Sosialisasi dan partisipasi dalam pengembangan pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi.</p>	<p>Capaian Target: INFID telah melakukan survei terbuka sebagai masukan dan persepsi masyarakat sipil dalam pengembangan M-KIA.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan INFID bersama dengan Kemenkes dalam bentuk rapat koordinasi dan survei pengumpulan persepsi umum dalam pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi berbasis data dan M-KIA. Selain itu ko-kreasi juga dilaksanakan dengan melibatkan INFID sebagai narasumber pada uji publik M-KIA.</p>	<p>Aktif</p>

Komitmen 15

Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19

<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerah (dalam APBD) yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.</p>		
<p>Kementerian Dalam Negeri</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Terlaksananya pengembangan portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri telah memiliki portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang dapat diakses publik di https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2020. 2. Pengembangan portal informasi dilakukan dengan menambahkan submenu yang khusus menyajikan data anggaran penanganan COVID-19 dalam situs web Kementerian Dalam Negeri. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam pelaksanaan UK Kemendagri dan UK Kemenkeu, tidak terjadi proses ko-kreasi dikarenakan tidak adanya partisipasi dari Seknas Fitra selaku OMS mitra dalam memberikan masukan terkait data apa saja yang termasuk dalam portal.</p>	<p>Pasif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID19 tahun 2020 (manual).</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 (manual). Dapat diakses melalui link berikut: https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2021</p>	<p>Nilai: 100%</p>



	<p>Struktur informasi yang disediakan, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahun 2020:<ol style="list-style-type: none">a. Alokasi dan realisasi pendanaan penanganan covid-19 di daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) bulan Oktober 2020.c. Alokasi dan realisasi pendanaan penanganan covid-19 di daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) bulan November 2020.d. Hasil November 2020:<ul style="list-style-type: none">· Tingkat Provinsi: dari alokasi anggaran sebesar 36,83 T, terserap sebesar 69,80%· Tingkat Kabupaten/Kota: dari alikasi anggaran sebesar 44,30 T, terserap sebesar 50,29%2. Tahun 2021:<ol style="list-style-type: none">a. Pendanaan penanganan covid-19 dalam APBD Provinsi.b. Pendanaan penanganan covid-19 dalam APBD Kabupaten/Kota.c. Dukungan vaksinasi dalam APBD Provinsi.d. Dukungan vaksinasi dalam APBD Kabupaten/Kota.e. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemik covid-19 APBD Provinsi.f. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemik covid-19 APBD Kabupaten/Kota.g. Hasil per Juni 2021:<ul style="list-style-type: none">· Rata rata realisasi anggaran penanganan pandemik Covid 19 di Provinsi adalah 6,37%, dengan realisasi tertinggi pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 56,68%· Rata rata realisasi anggaran penanganan pandemik Covid 19 di Kabupaten/Kota adalah 10,15%, dengan realisasi	
--	---	--

	<p>tertinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 47,36%</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kementerian Dalam Negeri belum melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pengembangan informasi realisasi anggaran Covid-19 di daerah.</p>	Pasif
<p>Target B18: Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 melalui portal yang telah dikembangkan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan data rekapitulasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kedepanya Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi dengan OMS mitra terkait bentuk penyajian agar data dapat sesuai dengan standar dan dapat dibagipakaikan oleh publik.</p>	Pasif
<p>Target B24: Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2021 melalui portal yang telah dikembangkan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan data rekapitulasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2021, namun belum melalui portal informasi yang aksesibel.</p> <p>Kedepanya untuk penyajian data yang dapat diakses dan digunakan oleh publik, maka diperlukan pembahasan dan koordinasi dengan OMS mitra sehingga sumber data yang menjadi data dukung dalam B24 ini dapat secara tepat guna dimanfaatkan oleh publik.</p>	Nilai: 100%



	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Belum terlihat adanya Ko-kreasi untuk B24 Target Capaian ini.</p>	Pasif
<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat pusat yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.</p>		
Kementerian Keuangan		
<p>Target B06:</p> <p>Terlaksananya pengembangan portal informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Keuangan telah memiliki portal informasi yang berisi data ringkasan umum APBN 2020-2021. Namun, capaian administratif hanya mencapai 70 persen dikarenakan belum ada informasi terkait tampilan data yang spesifik mengenai realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di website Kemenkeu. Sejauh ini rapat koordinasi masih dilakukan untuk pengembangan dan penyediaan raw data.</p>	Nilai: 70%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kementerian Keuangan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Seknas Fitra untuk mengembangkan portal anggaran COVID-19.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 melalui portal yang telah dikembangkan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. Data terkait realisasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dapat diakses pada laman https://pen.kemenkeu.go.id/ , dengan struktur informasi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Realisasi PEN sementara (progress penyerapan) periode Desember 2021, salah satunya sektor kesehatan</p>	Nilai: 100%

	<p>b. dengan hasil data per November 2021, untuk sektor Kesehatan terserap 76%</p> <p>2. Kementerian Keuangan sedang melakukan pengintegrasian data khususnya terkait anggaran dan alokasi PEN di website PC-PEN (https://pen.kemenkeu.go.id/) melalui koordinasi internal.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dikarenakan pengintegrasian data bersifat teknis, proses ini tidak melibatkan pihak OMS. Diharapkan kedepannya dapat dilakukan pembahasan terkait kedalaman data yang akan disajikan di portal yang telah terintegrasi.</p>	Aktif
<p>Target B24:</p> <p>Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2021 melalui portal yang telah dikembangkan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kemenkeu telah menyajikan informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2021 dengan bentuk grafik interaktif melalui portal pen.kemenkeu.go.id. Komponen informasinya meliputi anggaran kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan Korporasi, serta insentif usaha.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Pada proses ini belum terlihat pelibatan OMS, walaupun pada tahapan pengembangan sebelumnya sudah ada rapat koordinasi. Diharapkan kedepannya dapat dilakukan pembahasan terkait kedalaman data yang akan disajikan di portal yang telah terintegrasi dan visualisasi data pada portal.</p>	Semi-Aktif
Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)		
Ukuran Keberhasilan 1:		



<p>Terlaksananya kolaborasi pengembangan portal informasi realisasi anggaran pandemi COVID-19 yang komprehensif dan telah diaudit.</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Terlaksananya kajian untuk memberi masukan terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>SEKNAS FITRA sudah menyampaikan kajian terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19 kepada Kementerian/Lembaga (K/L) mitra. Terdapat sebuah kajian <i>desk study</i> yang dilaksanakan oleh koalisi OMS yakni Seknas FITRA, TII, IBC, ICW, dan AIPJ2 yang bertajuk “Menyelidik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya”.</p>	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>
	<p>Proses Kokreasi</p> <p>Hasil dari kajian tersebut adalah untuk pemerintah menaruh fokus besar tidak hanya pada penambahan anggaran penanganan COVID-19 namun juga pada tingkat penyerapannya. Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan adanya dokumentasi dan publikasi yang aktual mengenai anggaran penanganan COVID-19 agar potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Terlaksananya FGD terkait pengembangan sistem informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Seknas FITRA telah melaksanakan webinar pada bulan Juni 2021, serta audiensi dengan Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2021.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Diskusi atau FGD berisikan masukan terkait perbaikan tampilan <i>dashboard</i> website PC-PEN serta penyajian data per minggu.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>Sosialisasi Sistem Informasi Realisasi</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Tidak melaporkan Target Capaian</p>	<p>Nilai: 0%</p>

<p>Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 agar dapat digunakan oleh masyarakat luas</p>	<p>Proses Kokreasi: Tidak melaporkan Target Capaian.</p>	<p>Pasif</p>
<p>Target B24: Tersedianya evaluasi keterbukaan informasi anggaran penanganan pandemi COVID-19</p>	<p>Capaian Target: OMS tidak mengumpulkan Data Dukung.</p>	<p>Nilai: 0%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi: OMS tidak mengumpulkan Data Dukung.</p>	<p>Pasif</p>

Komitmen 16

Pelibatan Masyarakat Sipil Dalam Pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi) Untuk Mendorong Efektivitas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU KKR.</p>		
<p>Kementerian Hukum dan HAM</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan RUU KKR.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melibatkan masyarakat sipil dalam beberapa kegiatan sejak tahun 2020, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan substansi RUU KKR, tetapi ELSAM (unsur masyarakat) tidak dapat hadir. b. Rapat grand design penanganan peristiwa pelanggaran HAM, unsur masyarakat yang hadir adalah Profesor Harkristuti Harkrisnowo. c. Rapat grand design penanganan peristiwa pelanggaran HAM, unsur masyarakat yang hadir adalah Professor Jimly Asshiddiqie. d. Perumusan kebijakan penanganan peristiwa HAM berat, yang menjadi unsur masyarakat adalah Professor Asvi Warman Adam. Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan audiensi bersama KONTRAS dan korban peristiwa pelanggaran HAM berat untuk membahas RUU KKR serta penanganan dari peristiwa HAM berat. 	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kementerian Hukum dan HAM telah mengundang unsur non-pemerintah (OMS dan akademisi) dalam bentuk FGD untuk menjaring pendapat terkait perumusan RUU KKR.</p>	<p>Aktif</p>



<p>Target B12:</p> <p>Tersedianya naskah akademik dan RUU KKR yang sudah disampaikan kepada Presiden dan dapat diakses publik.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Direktorat Jenderal HAM telah menyusun instrumen HAM berupa Kajian Substansi Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) bersama IKOHI untuk menjawab permasalahan yang ada serta sebagai upaya konkret Pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Sebagai bukti nyata upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat ini, Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 Oktober 2021 telah mengirimkan permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RUU KKR kepada Presiden, yang diharapkan akan menjadi langkah upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial dalam bentuk upaya pemulihan dan rekonsiliasi untuk kepentingan para korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kementerian Hukum dan HAM telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yaitu Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI).</p>	<p>Aktif</p>
<p>OMS Sektor Keadilan</p>		
<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan RUU KKR.</p>		



<p>Target B06:</p> <p>Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik, dan RUU KKR.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Dirjen HAM belum melibatkan OMS Sektor Keadilan yang tergabung di RAN OGI.</p>	<p>Nilai: N/A</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>PBHI menyampaikan masukan terkait RUU KKR di forum diskusi publik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong adanya dukungan penegakan hukum. b. Mendorong lahirnya RUU KKR dengan proses pembahasan yang transparan dan pelibatan masyarakat yang aktif. c. Mendukung adanya bantuan lain selain LPSK (Bantuan Medis, Psikis, Psikososial, dll.) bagi korban pelanggaran HAM. 	<p>N/A</p>
<p>Target B12:</p> <p>Tersedianya naskah akademik dan RUU KKR yang sudah disampaikan kepada Presiden dan dapat diakses publik.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS Sektor Keadilan tidak mengumpulkan data dukung untuk target semester dua. Selain itu, keterlibatan OMS Sektor Keadilan tidak dapat tergambarkan dalam Data Dukung Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>Nilai: 0%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS Sektor Keadilan tidak mengumpulkan data dukung untuk target semester dua. Selain itu, OMS Sektor Keadilan tidak dilibatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>N/A</p>

Komitmen 17
Keterbukaan Data Beneficial Ownership (BO)

Ukuran Keberhasilan 1:		
Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.		
Stranas PK		
Target B06: Adanya sosialisasi, termasuk publikasi, atas kewajiban penyampaian informasi data BO Korporasi.	Capaian Target: Jumlah korporasi aktif sampai B06 2.262.080 sementara yg mendeklarasi BO 478.022 (21,13%).	Nilai: 21%
	Proses Kokreasi: Melibatkan Publish What You Pay (PWYP) dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif
Target B12: 1. Adanya kriteria mitigasi resiko dan peta korporasi berdasarkan tingkat resiko terjadinya Tipikor, TPPU, TPPT, Pidana Perpajakan dan kerusakan SDA. 2. Adanya input dari K/L pelaksana atas kriteria mitigasi resiko dan peta korporasi berdasarkan tingkat resiko	Capaian Target: 1. Berdasarkan data KemenkumHAM, korporasi yang telah mendeklarasi BO adalah 478.022 (21,13%) atau bertambah sebesar 1,99% dari periode B03, 539.622 (23,12%). 2. Salah satu kendala rendahnya penambahan ini karena belum ada satupun sistem basis data yang dikembangkan K/L yang telah terintegrasikan dengan sistem basis data di KemenkumHAM.	Nilai: 23%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif

terjadinya Tipikor, TPPU, TPPT, Pidana Perpajakan dan kerusakan SDA.		
Target B18: 1. Adanya struktur data BO, termasuk mekanisme integrasi yang akan digunakan 2. Adanya sistem basis data BO yang terintegrasi 3. Adanya fitur pelacakan relasi BO pada AHU Online	Capaian Target: Berdasarkan data KemenkumHAM, korporasi yang telah mendeklarasi BO adalah 617.851 (26,33%) atau bertambah sebesar 3,21% dari periode B12, 539.622 (23,12%).	Nilai: 26%
	Proses Ko-kreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan kajian.	Aktif
Target B24: 100% (Seluruh korporasi mendeklarasikan BO)	Capaian Target: Jumlah korporasi aktif (PT, Yayasan, CV, Firma, PP) yang telah mendeklarasikan BO per Desember 2022 bertambah sejumlah 9% dibandingkan pada B18. Jumlah korporasi aktif yang mendeklarasikan BO jumlahnya 744.683 dari total 1.935.499 korporasi atau setara dengan 38,47%.	Nilai: 38%
	Proses Ko-kreasi: Melibatkan Publish What You Pay (PWYP) dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan kajian. Rapat koordinasi juga beberapa kali dilaksanakan dengan mengundang PWYP.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat.		



Stranas PK		
Target B06: Adanya pemetaan dan penetapan layering informasi data BO yang dapat diakses publik	Capaian Target: Jumlah akses layer publik belum menunjukkan perkembangan.	Nilai: 1%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif
Target B12: Adanya fitur kanal akses publik pada sistem basis data BO yang dilengkapi dengan identitas dan rencana pemanfaatan oleh pengguna.	Capaian Target: Jumlah akses layer publik pada B12 sudah mencapai 11,4%.	Nilai: 1%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan kajian.	Aktif
Target B18: Adanya analisa dan rekapitulasi akses publik beserta informasi pemanfaatannya	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai capaian output 2 sampai Triwulan V (B15) ini belum ada perubahan, yakni 1% 2. Belum ada capaian yang dapat dipenuhi karena target output baru ditetapkan/muncul di B12 3. Kajian keterbukaan informasi publik data BO telah dilakukan oleh PWYP (Publish What You Pay) KemenkumHAM juga telah melakukan ekspos hasil kajian tersebut. Namun, KemenkumHAM belum menindaklanjuti hasil kajian tersebut karena ketiadaan dasar hukum 4. KemenkumHAM perlu membuat kebijakan untuk menyediakan sistem keterbukaan 	Nilai: 1%

	informasi BO kepada publik sebagaimana masukan dari masyarakat sipil	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan kajian.</p>	Aktif
<p>Target B24:</p> <p>1. Tersedianya layer akses publik di sistem basis data BO</p> <p>2. 30% peningkatan akses oleh publik per triwulanan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. Akses publik pada sistem basis data BO yang berisikan penerima manfaat telah dibuka oleh KemenkumHAM per 1 Juli 2022 pada link https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat. Namun demikian, KemenkumHAM perlu untuk terus melakukan perbaikan utamanya dalam kemudahan akses dan kelengkapan informasi yang disajikan.</p> <p>2. Peningkatan akses oleh publik dalam sistem basis data BO belum terlihat di dalam Laporan Triwulan-an Stranas PK</p>	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Melibatkan Publish What You Pay (PWYP) dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan kajian. Rapat koordinasi juga beberapa kali dilaksanakan dengan mengundang PWYP.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 3:</p> <p>Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.</p>		
<p>Stranas PK</p>		



Target B06: Adanya pemetaan dan penetapan layering informasi data BO yang akan digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka penanganan perkara.	Capaian Target: Jumlah layer akses APH untuk kebutuhan penegakan hukum belum ada progress.	Nilai: 1%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian	Aktif
Target B12: Adanya fitur kanal akses pada sistem basis data BO yang dapat oleh APH, termasuk APIP dalam rangka penanganan perkara	Capaian Target: Jumlah layer akses APH untuk kebutuhan penegakan hukum mencapai progress sebesar 17%	Nilai: 4%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam diskusi pengembangan fitur kanal akses pada sistem basis data BO	Aktif
Target B18: 1. Adanya analisa dan rekapitulasi akses APH 2. Adanya analisa dan rekapitulasi perizinan yang informasi BO-nya telah terverifikasi 3. Adanya fitur verifikasi BO berdasarkan tingkat risiko pada SIKAP	Capaian Target: Nilai capaian output 3 sampai Triwulan V (B15) mengalami kemajuan cukup baik karena sumbangan dari beberapa K/L, khususnya Kementan dan KemenESDM pada indikator (b). Berikut progres dan kendala yang dapat disampaikan: a) KemenkumHAM belum dapat mengembangkan sistem tur untuk penyediaan akses Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Data BO dengan alasan belum ada kebijakan atau PKS mengenai dibukanya akses untuk APH terhadap data BO. Walaupun demikian akses atau pemanfaatan data telah dilakukan secara manual melalui surat permohonan dari LPH kepada KemenkumHAM. Yang dilaporkan	Nilai: 20,6%



	<p>sudah memanfaatkan data adalah KPK, PPATK, dan Kejaksaan.</p> <p>b) Proses perizinan di kementerian/lembaga pun belum sepenuhnya memanfaatkan data BO sebagai penapis. Hanya KemenESDM dan Kementan yang telah memanfaatkan data BO tersebut, dan telah didukung dengan ketentuan internalnya; BKPM sudah berkomitmen menerapkan data BO sebagai penapis perizinan di OSS.</p> <p>c) Pemanfaatan data BO oleh korporasi peserta pengadaan barang dan jasa juga sedang diupayakan baik oleh KemenkumHAM dan LKPP. Saat ini telah lahir draf PKS pada 15 Desember 2021. Draf PKS tersebut telah dikirimkan LKPP pada 22 Januari 2022, namun hingga saat ini belum ada feedback dari KemenkumHAM.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan kajian.</p>	Aktif
<p>Target B24:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya layer akses Aparat Penegak Hukum (APH) di sistem basis data BO2. 10% Peningkatan akses oleh APH untuk kebutuhan penanganan perkara3. 100% setiap pengajuan izin di K/L piloting wajib mendeklarasikan BO4. 100% data BO terintegrasi dengan	<p>Capaian Target:</p> <p>Nilai capaian UK 3 sampai dengan Triwulan B24 mengalami peningkatan dibandingkan dengan B18 walaupun belum terlalu signifikan. Hal ini karena adanya kemajuan cukup baik lewat kontribusi beberapa K/L. Progres dan kendala tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. KemenkumHAM belum dapat mengembangkan sistem fitur untuk penyediaan akses Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Data BO dengan alasan belum ada kebijakan atau PKS mengenai dibukanya akses data BO bagi APH, kecuali dengan PPATK dan KPK. Walaupun demikian akses atau pemanfaatan data telah dilakukan secara manual melalui surat permohonan dari LPH kepada	<p>Nilai: 57,5%</p>



SIKAP (LKPP)	<p>KemenkumHAM. Yang terlapor sudah memanfaatkan data adalah KPK (melalui application programming interface), PPATK (secara Online), Kejaksaan dan kepolisian (secara manual)</p> <p>b. Proses perizinan di kementerian/lembaga pun belum sepenuhnya memanfaatkan data BO sebagai penapis. Hanya KemenESDM dan Kementan yang telah memanfaatkan data BO tersebut dan telah didukung dengan ketentuan internalnya; BKPM baru pada tahap komitmen menerapkan data BO sebagai penapis perizinan di OSS; di Kemen ATR/BPN, basis data BO terkait pemohon HGU belum dilakukan secara online; untuk KLHK, pemohon perizinan di sektor kehutanan belum didukung regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk deklarasi BO. Perlu dilakukan PKS antara KLHK dan KemenkumHAM</p> <p>c. Pemanfaatan data BO oleh korporasi peserta pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap pembahasan antara KemenkumHAM dan LKPP. Saat ini telah dilakukan legal drafting terhadap rancangan PKS antara KemenkumHAM dan LKPP. Sebelumnya telah dilakukan proses penyepakatan elemen data terkait pemilik manfaat dan juga klausul-klausul tentang peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Melibatkan Publish What You Pay (PWYP) dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan kajian. Rapat koordinasi juga beberapa kali dilaksanakan dengan mengundang PWYP.</p>	Aktif



PWYP		
Ukuran Keberhasilan 1:		
Adanya keterlibatan dan peran aktif Masyarakat Sipil dalam setiap tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, baik dalam pencapaian:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya basis data BO. 2. Terbukanya akses data BO kepada Publik. 3. Termanfaatkannya data BO oleh Masyarakat Sipil, APH maupun K/L. 		
Target B06: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kajian keterbukaan data BO. 2. Adanya panduan memahami BO dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA. 	Capaian Target: PWYP telah membantu menyusun Panduan Memahami BO serta Pemetaan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA. Kajian sudah diselesaikan seja B06.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PWYP aktif berkoordinasi dengan Stranas – PK dan membantu mengawal keterbukaan data BO dengan menyusun kajian terkait keterbukaan data BO.	Aktif
Target B12: Adanya sosialisasi dan pelatihan untuk CSO dan/atau komunitas dalam memahami BO dan Memetakan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA.	Capaian Target: PWYP telah membuat webinar-webinar, serta bentuk sosialisasi lainnya (konten sosial media) terkait BO.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Namun pemerintah belum menemukan titik temu terkait data BO yang dapat diakses kepada publik.	Aktif



Target B18: 1. Adanya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aksi BO 2. Adanya lesson learnt pelaksanaan Aksi BO	Capaian Target: PWYP Indonesia telah memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, secara khusus pada portal akses informasi data BO oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Belum semua korporasi melaporkan data BO ke Ditjen AHU Kemenkumham (Hanya sekitar 26% korporasi yang telah melapor)- Data BO masih versi korporasi dan belum mendapatkan verifikasi dari pemerintah- Masih terdapat sejumlah perbedaan data BO antara Ditjen AHU dengan EITI (Kementerian ESDM).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: PWYP telah terlibat dalam rapat-rapat terkait pelaksanaan Beneficial Ownership yang dilaksanakan oleh STRANAS-PK	Aktif
Target B24: 1. Adanya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aksi BO 2. Adanya lesson learnt pelaksanaan Aksi BO	Capaian Target: PWYP telah melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan lesson learnt pelaksanaan Aksi BO dalam Rencana Aksi untuk periode 2021-2022. Didapatkan hasil bahwa masih terdapat kendala dan target yang belum tercapai utamanya dalam mekanisme verifikasi data, kewajiban deklarasi BO, K/L penanggung jawab BO, kendala administratif, kepatuhan korporasi, dan minimnya peran serta masyarakat. Aksi BO akan dilanjutkan sebagai komitmen dalam RAN OGI VII 2023-2024.	Nilai: 100%



	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi telah dilaksanakan PWYP dengan Stranas PK lewat keterlibatan dan kerja sama keduanya dalam FGD Penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 terkait dengan Beneficial Ownership sebagai tindak lanjut komitmen dari pemerintah dan nonpemerintah mengawal aksi BO untuk rencana aksi di tahun depan.</p>	<p>Aktif</p>
--	---	---------------------

Komitmen 18
Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

Ukuran Keberhasilan 1:		
Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.		
Kementerian PPN/Bappenas		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Penelitian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restorative.	Direktorat Hukum dan Regulasi telah melakukan penelitian yang hasilnya diharapkan dapat rekomendasi kebijakan penerapan keadilan restoratif dan menyatukan persepsi mengenai keadilan restoratif antar penegak hukum.	Aktif
	Proses Kokreasi:	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Tersedianya roadmap terkait Keadilan Restoratif.	Telah tersedia peta jalan terkait keadilan restoratif yang menjabarkan 9 aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Definisi, Ruang Lingkup dan Mekanisme Pelaksanaan RJ. 2. Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP. 3. Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHAP. 4. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan dan pemenuhan hak bagi penyalahguna narkoba. 	



	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mekanisme Diversi Pada Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak (UU SPPA). 6. Penguatan Substansi dan Kesiapan Implementasi Ketentuan RKUHP yang Mendukung Keadilan Restoratif. 7. Penguatan Substansi dan Kesiapan Implementasi Ketentuan RKUHAP yang Mendukung Keadilan Restoratif. 8. Pemulihan Korban Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban (Pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat), UU Perlindungan Anak, dan UU TPPO. 9. Penguatan Peran Penelitian Kemasyarakatan. 	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Bappenas telah melakukan kokreasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil OGI, dalam bentuk jejaring pendapat dan juga menerima masukan hasil kajian dari IJRS.</p>	Aktif
<p>Target B18: Diseminasi hasil kajian terkait ruang kewargaan oleh Sekretariat Open Government Indonesia</p>	<p>Target Capaian:</p> <p>Berdasarkan kesepakatan bersama antar Direktorat Hukum dan Regulasi dan OMS Keadilan, akan dilakukan perubahan target capaian, yakni pengubahan target menjadi “tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan” yang diundur ke periode B24. Oleh sebab itu, tidak ada pelaporan yang dilakukan untuk B18.</p> <p>Kesepakatan sudah ditandatangani antar kedua pihak.</p>	Nilai: -
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Target diubah dan diundur ke B24 berdasarkan kesepakatan bersama,</p>	N/A



	sehingga tidak ada pelaporan target capaian maupun hasil kokreasi dalam periode B18.	
Target B24: Tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan	Capaian Target: Kementerian PPN/Bappenas telah mengumpulkan data dukung berupa kajian perluasan jaminan keterbukaan ruang kewargaan yang disusun secara ko-kreasi dengan OMS. Dalam data dukung tersebut, dilampirkan pula catatan penguatan komitmen terkait perluasan ruang kewargaan di Indonesia yang tertuang dalam 3 (tiga) poin utama.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Pada periode B24, Kementerian PPN/Bappenas dan OMS telah melakukan ko-kreasi dalam penyusunan <i>policy brief</i> terkait perluasan jaminan keterbukaan ruang kewargaan. Namun, berdasarkan catatan dari OMS, pembahasan awal komitmen ini saat proses penyusunan RAN OGI VI tidak melibatkan OMS yang bergerak di isu perluasan ruang kewargaan, sehingga fokus dari kajian terkait perluasan ruang kewargaan selama periode sebelumnya terbatas pada ranah keadilan restoratif. Setelah periode B24 RAN OGI VI, diharapkan K/L dan OMS dapat melanjutkan kerja sama dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik.	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.		

Target B06: Tersedianya kajian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Capaian Target: Telah menyusun kajian bersama dengan Kementerian Bappenas.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kajian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Aktif
Target B12: Tersedianya kajian dan rekomendasi mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Capaian Target: Walaupun OMS tidak mengumpulkan data dukung, kontribusi OMS tergambar dalam data dukung yang diberikan Bappenas.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Walaupun OMS tidak mengumpulkan data dukung, keterlibatan OMS tergambar dalam data dukung yang diberikan Bappenas.	Aktif
Target B18: Tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan.	Capaian Target: Berdasarkan kesepakatan bersama antar Direktorat Hukum dan Regulasi dan OMS Keadilan, akan dilakukan perubahan target capaian, yakni pengunduran target “tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan” ke periode B24. Oleh sebab itu, tidak ada pelaporan yang dilakukan untuk B18. Kesepakatan sudah ditandatangani antar kedua pihak.	Nilai: -
	Proses Kokreasi:	N/A



	Target diubah dan diundur ke B24 berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada pelaporan target capaian maupun hasil kokreasi dalam periode B18.	
Target B24: Tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan	Capaian Target: OMS Sektor Keadilan telah mengumpulkan data dukung berupa kajian perluasan jaminan keterbukaan ruang kewargaan yang disusun secara ko-kreasi dengan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam data dukung tersebut, dilampirkan pula catatan penguatan komitmen terkait perluasan ruang kewargaan di Indonesia yang tertuang dalam 3 (tiga) poin utama. Sebagai dokumen pendukung, OMS juga telah mengumpulkan hasil FGD antar Kementerian PPN/Bappenas dan OMS yang bergerak di ruang lingkup keadilan restoratif serta perluasan ruang kewargaan.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Pada periode B24, OMS dan Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan ko-kreasi dalam penyusunan <i>policy brief</i> terkait perluasan jaminan keterbukaan ruang kewargaan. Namun, berdasarkan catatan dari OMS, pembahasan awal komitmen ini saat proses penyusunan RAN OGI VI tidak melibatkan OMS yang bergerak di isu perluasan ruang kewargaan, sehingga fokus dari kajian terkait perluasan ruang kewargaan selama periode sebelumnya terbatas pada ranah keadilan restoratif. Setelah periode B24 RAN OGI VI, diharapkan K/L dan OMS dapat melanjutkan kerja sama dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik.	Aktif